

BUKU PEGANGAN 2009



BAGIAN II



BAB II. PENYEBAB DAN DAMPAK KRISIS KEUANGAN GLOBAL

BAB II

PENYEBAB DAN DAMPAK KRISIS KEUANGAN GLOBAL

Krisis keuangan yang terjadi di Amerika Serikat belakangan ini telah berkembang menjadi masalah serius dan gejala yang ditimbulkannya mulai mempengaruhi stabilitas ekonomi di beberapa kawasan. Pembangunan daerah disisi lain merupakan bagian integral dari pembangunan nasional, yang juga dapat terkena dampak krisis yang terjadi, maka Pemerintah terus memberikan perhatian yang sungguh-sungguh terhadap kelangsungan dan keberhasilan pembangunan di daerah. Gejala krisis keuangan global yang mempengaruhi pembangunan di daerah tentunya juga akan sangat berpengaruh pada tingkat pencapaian pembangunan nasional. Pada Bab ini akan dipaparkan beberapa penyebab terjadinya krisis keuangan global, kondisi perekonomian dunia saat ini, dan juga dampak yang telah atau mungkin akan terjadi dari krisis keuangan global ini. Dengan demikian, didapatkan pemahaman yang sama akan kondisi perekonomian Indonesia dan dampak krisis yang dihadapi oleh Indonesia, baik di tingkat nasional maupun daerah.

2.1 Penyebab Krisis Keuangan Global

Krisis keuangan global yang terjadi saat ini sangat terkait erat dengan kondisi perekonomian Amerika yang memburuk. Krisis keuangan yang terjadi di Amerika Serikat telah berkembang menjadi masalah yang serius. Guncangan yang terjadi pada negara adikuasa tersebut dipastikan telah memberikan dampak terhadap perekonomian dunia. Gejala perekonomian yang terjadi di Amerika Serikat telah mempengaruhi stabilitas ekonomi global di beberapa kawasan. Keterbukaan ekonomi antar negara, memungkinkan terjadinya resesi di suatu negara untuk mengarah dan mempengaruhi negara lainnya.

Krisis keuangan global yang terjadi saat ini sangat terkait erat dengan kondisi perekonomian Amerika yang memburuk

Krisis keuangan yang terjadi di Amerika Serikat bermula dari krisis kredit perumahan di Amerika Serikat. Amerika Serikat pada tahun 1925 telah menetapkan undang-undang mengenai *Mortgage* (Perumahan). Peraturan tersebut berkaitan dengan sektor properti, termasuk kredit kepemilikan rumah yang memberikan kemudahan bagi para kreditur.

Kemudahan pemberian kredit tersebut juga terjadi pada saat harga properti di AS sedang mengalami kenaikan. Hal ini juga diikuti dengan spekulasi di sektor ini yang meningkat. Permasalahan muncul ketika banyak lembaga keuangan pemberi kredit properti di Amerika Serikat menyalurkan kredit kepada masyarakat yang sebenarnya secara finansial tidak layak memperoleh kredit yaitu kepada masyarakat yang tidak memiliki kemampuan ekonomi untuk memenuhi kredit yang mereka lakukan.

Situasi tersebut memicu terjadinya kredit macet di sektor properti (*subprime mortgage*). Kredit macet di sektor properti tersebut mengakibatkan efek domino yang mengarah pada bangkrutnya beberapa lembaga keuangan di Amerika Serikat. Hal ini dikarenakan lembaga pembiayaan sektor properti umumnya meminjam dana jangka pendek dari pihak lain yang umumnya adalah lembaga keuangan. Jaminan yang diberikan perusahaan pembiayaan kredit properti adalah surat utang (*subprime mortgage securities*) yang dijual kepada lembaga-lembaga investasi dan investor di berbagai negara. Padahal, surat utang tersebut tidak ditopang dengan jaminan debitor yang memiliki kemampuan membayar kredit perumahan yang baik.

Dengan adanya tunggakan kredit properti, perusahaan pembiayaan tidak bisa memenuhi kewajibannya kepada lembaga-lembaga keuangan, baik bank investasi maupun *aset management*. Hal tersebut mempengaruhi likuiditas pasar modal maupun sistem perbankan. Kondisi tersebut mengarah kepada terjadinya pengeringan likuiditas lembaga-lembaga keuangan akibat tidak memiliki dana aktiva untuk membayar kewajiban yang ada. Ketidakmampuan membayar kewajiban tersebut membuat lembaga keuangan yang memberikan pinjaman terancam kebangkrutan.

Kondisi yang dihadapi lembaga-lembaga keuangan besar di Amerika Serikat mempengaruhi likuiditas lembaga keuangan yang lain, baik yang berada di Amerika Serikat maupun di luar Amerika Serikat terutama lembaga yang menginvestasikan uangnya melalui instrumen lembaga keuangan besar di Amerika Serikat. Disinilah krisis keuangan global bermula.

Dampak krisis keuangan global di setiap Negara sangat tergantung pada kebijakan dan fundamental ekonomi Negara masing-masing

2.2 Kondisi Perekonomian Dunia Saat ini dan Dampak Ke Depan

Dampak krisis keuangan global di tiap negara akan berbeda, karena sangat bergantung pada kebijakan yang diambil dan fundamental ekonomi

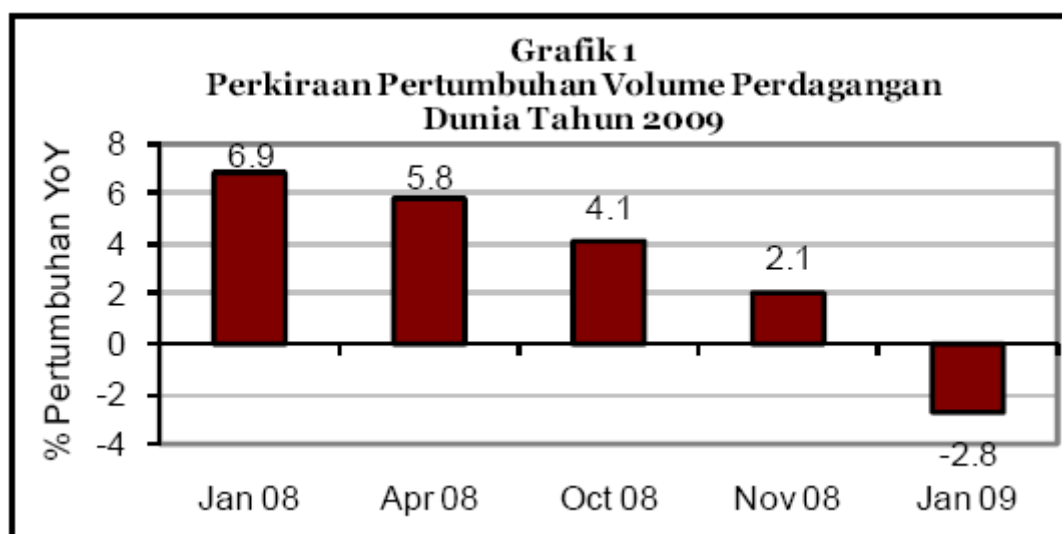
negara yang bersangkutan. Besarnya dampak krisis telah menyebabkan adanya koreksi proyeksi tingkat pertumbuhan ekonomi berbagai negara dan dunia. Perekonomian Amerika Serikat diprediksikan akan melemah. Dengan demikian, negara-negara di kawasan Eropa dan Asia Pasifik akan melemah pula.

2.3 Dampak Krisis Keuangan Global Terhadap Perekonomian Nasional

Krisis keuangan global yang terus berlangsung saat ini menyebabkan macetnya sistem keuangan dunia sehingga menyebabkan merosotnya aktivitas ekonomi dan perdagangan dunia. Perlambatan pertumbuhan ekonomi dunia dan menurunnya pertumbuhan volume perdagangan dunia telah terjadi sejak pertengahan tahun 2007. Volume perdagangan dunia dalam tahun 2009 terus merosot ditunjukkan dengan proyeksi IMF yang mengalami beberapa kali revisi volume perdagangan dunia pada tahun 2009 dari 6,9 persen yaitu proyeksi yang dibuat pada bulan Januari 2008 menjadi 2,1 persen pada bulan November 2008 dan bahkan pada bulan Januari 2009 proyeksi pertumbuhan volume perdagangan dunia direvisi kembali menjadi negatif 2,8 persen (lihat **Gambar 2.1**). Hal ini tentunya akan memberikan dampak langsung yang signifikan bagi negara-negara yang perekonomiannya ditopang oleh ekspor seperti Cina, Jepang, Korea, dan negara ASEAN, termasuk Indonesia.

Krisis keuangan global yang terus berlangsung menyebabkan merosotnya aktivitas ekonomi dan perdagangan dunia

Gambar 2.1. Perkiraan Pertumbuhan Perdagangan Dunia Tahun 2009



Sumber: IMF (World Economic Outlook – Update, Jan 2009)

Melihat perkembangan yang makin memburuk pada triwulan terakhir ini, seluruh lembaga keuangan dan ekonomi dunia seperti IMF, OECD, Bank Dunia dan ADB melakukan revisi ke bawah tingkat pertumbuhan perekonomian dunia. IMF misalnya, menyampaikan bahwa pertumbuhan ekonomi dunia tahun 2009 diperkirakan masih tertekan sehingga perkiraannya direvisi menjadi 2,2 persen pada bulan November 2008, dari sebelumnya 3,0 persen pada bulan Oktober 2008. Namun pada Januari 2009, IMF kembali melakukan revisi ke bawah atas proyeksi pertumbuhan ekonomi dunia menjadi 0,5 persen. Merosotnya perekonomian dunia ini tentunya akan sangat berpengaruh pada perkembangan perekonomian Indonesia. Antisipasi yang dilakukan oleh Pemerintah dalam menyikapi kondisi ini adalah melakukan beberapa penyesuaian besaran asumsi makro seperti yang akan dipaparkan pada Bab IV dalam Buku Pegangan 2009 ini.

2.3.1 Dampak Terhadap Perkembangan Ekonomi Makro

Pertumbuhan ekonomi Indonesia selama tahun 2008 mencapai 6,1 persen. Dari sisi permintaan, pertumbuhan ekonomi pada tahun 2008 terutama didorong oleh investasi berupa pembentukan modal tetap bruto (PMTB) dan ekspor barang dan jasa yang masing-masing tumbuh sebesar 11,7 persen dan 9,5 persen. Sementara itu, konsumsi masyarakat tumbuh sebesar 5,3 persen dan konsumsi pemerintah meningkat sebesar 10,4 persen. Dari sisi produksi, pertumbuhan ekonomi pada tahun 2008 terutama didorong oleh sektor pertanian yang tumbuh 4,8 persen. Adapun industri pengolahan nonmigas tumbuh sebesar 4,0 persen. Pertumbuhan ekonomi didorong pula oleh pertumbuhan sektor tersier terutama pengangkutan dan telekomunikasi; listrik, gas dan air bersih; serta konstruksi yang masing-masing tumbuh sebesar 16,7 persen; 10,9 persen, dan 7,3 persen.

Dampak yang ditimbulkan oleh krisis keuangan global terhadap perekonomian Indonesia mulai dirasakan pada triwulan IV tahun 2008

Dampak yang ditimbulkan oleh krisis keuangan global terhadap perekonomian Indonesia mulai dirasakan pada triwulan IV tahun 2008, dimana pertumbuhan ekonomi triwulan IV tahun 2008 menurun sebesar minus 3,6 persen dibandingkan triwulan III-2008 (q-t-q), dan meningkat 5,2 persen (yoy) dibandingkan dengan triwulan IV-2007 yang berarti lebih lambat dari pertumbuhan ekonomi pada triwulan-triwulan sebelumnya pada tahun 2008 yaitu 6,2 persen di triwulan I, 6,4 persen pada triwulan II, 6,4 persen pada triwulan III. Melemahnya pertumbuhan ekonomi pada triwulan IV tahun 2008 disebabkan oleh menurunnya pertumbuhan ekspor barang dan jasa yaitu minus 5,5 persen dibandingkan triwulan III-2008 (q-t-q) dan hanya meningkat sebesar 1,8 persen dibandingkan triwulan IV tahun 2007 (y-o-y). Melemahnya pertumbuhan ekspor barang dan jasa adalah sebagai akibat dari menurunnya harga minyak serta

menurunnya harga dan permintaan komoditas ekspor Indonesia sebagai dampak dari krisis keuangan global.

Penurunan ekspor dan perlambatan pertumbuhan investasi sebagai sumber pertumbuhan ekonomi diperkirakan akan terus terjadi pada tahun 2009. Untuk menjaga kemerosotan pertumbuhan ekonomi, konsumsi masyarakat diupayakan untuk tetap dijaga dengan menjaga daya beli masyarakat melalui pengendalian inflasi dan berbagai program pengurangan kemiskinan. Di samping itu efektifitas pengeluaran pemerintah juga ditingkatkan dengan program stimulus untuk menjaga daya beli masyarakat dan peningkatan investasi. Dengan memperhatikan pengaruh eksternal dan berbagai kebijakan yang diambil, pertumbuhan ekonomi tahun 2009 diproyeksikan berkisar antara 4,0 – 4,5 persen.

Penurunan ekspor dan perlambatan pertumbuhan investasi sebagai sumber pertumbuhan ekonomi diperkirakan akan terus terjadi pada tahun 2009

Melambatnya pertumbuhan ekonomi dunia pada tahun 2008 dan menurunnya harga-harga komoditi dunia mendorong penurunan penerimaan ekspor nasional. Pada tahun 2008, total penerimaan ekspor mencapai USD 139,3 miliar, atau naik 18,1 persen dibandingkan tahun 2007. Kenaikan tersebut didorong oleh ekspor migas dan nonmigas yang meningkat masing-masing sebesar 27,3 persen dan 15,5 persen. Sementara itu dalam tahun 2008, impor meningkat menjadi USD 116,0 miliar, atau naik 36,0 persen. Peningkatan ini didorong oleh impor migas dan nonmigas yang masing-masing naik sebesar 24,5 persen dan 39,4 persen. Dengan defisit jasa-jasa (termasuk *income* dan *current transfer*) yang mencapai USD 22,7 miliar, surplus neraca transaksi berjalan pada tahun 2008 mencapai sekitar USD 0,6 miliar turun dibandingkan tahun 2007 yang mencapai USD 10,5 miliar.

Melambatnya pertumbuhan ekonomi dunia pada tahun 2008 dan menurunnya harga-harga komoditi dunia mendorong penurunan penerimaan ekspor nasional

Investasi langsung asing (neto) mencapai surplus sebesar USD 2,5 miliar didorong oleh investasi langsung asing yang masuk sebesar USD 8,3 miliar. Pada semester I/2008 arus masuk investasi portofolio meningkat, namun pada semester II/2008 cenderung melambat. Hal ini terutama dipengaruhi oleh arus modal keluar dari para investor guna memenuhi kebutuhan konsolidasi keuangan global, yang pada akhirnya berimbas pada pelepasan surat utang negara (SUN) dan surat berharga Bank Indonesia (SBI) yang terjadi selama semester II/2008. Secara keseluruhan tahun 2007, investasi portofolio neto mencapai USD 1,8 miliar turun dibandingkan tahun 2008 (USD 5,7 miliar) dengan investasi portofolio yang masuk sebesar USD 3,0 miliar. Adapun arus modal lainnya pada tahun 2008 mengalami defisit sebesar USD 6,3 miliar didorong oleh investasi lainnya di luar negeri sebesar USD 10,1 miliar. Dengan perkembangan ini neraca modal dan finansial dalam keseluruhan tahun 2008 mengalami defisit USD 1,7 miliar dengan cadangan devisa mencapai USD 51,6 miliar atau cukup untuk membiayai kebutuhan 4,0 bulan impor.

Realisasi APBN Tahun 2008 banyak dipengaruhi oleh perkembangan ekonomi global, antara lain tingginya harga komoditi khususnya minyak bumi dan gas alam (migas) serta depresiasi nilai tukar rupiah terhadap mata uang US dollar

Di sisi keuangan negara, realisasi APBN Tahun 2008 banyak dipengaruhi oleh perkembangan ekonomi global, antara lain tingginya harga komoditi khususnya minyak bumi dan gas alam (migas) serta krisis finansial global yang mendorong depresiasi nilai tukar rupiah terhadap mata uang US dollar. Sampai dengan 31 Desember 2008, realisasi pendapatan negara dan hibah mencapai Rp 981 triliun atau 21 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Realisasi penerimaan negara dan hibah tersebut meningkat sebesar Rp 273,2 triliun atau naik sebesar 38,6 persen bila dibandingkan dengan realisasi APBN tahun 2007.

Peningkatan pendapatan negara dan hibah tersebut utamanya didorong oleh peningkatan penerimaan perpajakan. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2007, realisasi penerimaan perpajakan meningkat sebesar 34,2 persen dan penerimaan negara bukan pajak meningkat sebesar 48,8 persen. Peningkatan pendapatan negara dan hibah tersebut selain disebabkan oleh perbaikan dan reformasi administrasi perpajakan yang berkelanjutan (di antaranya melalui kebijakan intensifikasi perpajakan dan *sunset policy*), juga didorong oleh faktor eksternal, terutama meningkatnya harga komoditi di pasar internasional. Sementara itu, di sisi pengeluaran, realisasi belanja negara hingga 31 Desember 2008 mencapai Rp 985,3 triliun (21 persen terhadap PDB) atau meningkat sebesar 30 persen dibandingkan realisasi APBN Tahun 2007. Peningkatan realisasi belanja negara tersebut utamanya didorong oleh peningkatan realisasi belanja pemerintah pusat sebesar 37,3 persen atau meningkat sebesar Rp188,3 triliun dan belanja ke daerah meningkat 15,5 persen atau sebesar Rp. 39,4 triliun.

Sejalan dengan upaya pengamanan APBN tersebut, pemerintah mampu menekan defisit APBN Tahun 2008 menjadi sebesar 0,1 persen terhadap PDB. Realisasi tersebut jauh lebih rendah dibandingkan realisasi defisit tahun 2007 yang besarnya 1,3 persen terhadap PDB. Rendahnya realisasi defisit anggaran tersebut menimbulkan adanya kelebihan pembiayaan dalam bentuk Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) sebesar Rp51,3 triliun. Kelebihan ini selanjutnya akan digunakan untuk memberikan stimulus fiskal pada tahun 2009. Dengan demikian, stok utang pemerintah pada akhir tahun 2008 diperkirakan sebesar 34,7 persen terhadap PDB.

Selanjutnya pada tahun 2009, APBN diperkirakan masih akan mendapat tekanan dari faktor eksternal akibat krisis keuangan global. Melemahnya peran investasi swasta dan ekspor akibat turunnya perekonomian global, telah menjadikan peran kebijakan fiskal menjadi sangat strategis sebagai bentuk kebijakan *counter-cyclical* dalam menghadapi ancaman krisis ekonomi sepanjang tahun 2009. Terkait dengan itu, telah dilakukan perubahan terhadap beberapa asumsi makro

ekonomi yang telah ditetapkan sebelumnya melalui UU No. 41 Tahun 2008 tentang APBN Tahun 2009. Perubahan asumsi tersebut antara lain adalah perubahan target pertumbuhan ekonomi yang turun dari 6,0 persen menjadi sekitar 4,5 persen, perkiraan harga minyak mentah Indonesia yang turun dari USD 80 dolar per barel menjadi USD 45 dolar per barel, serta perkiraan nilai tukar rupiah terhadap US dolar yang terdepresiasi dari Rp.9.400 per 1 US dolar menjadi Rp11.000 per 1 US dolar. Selain itu, perubahan APBN Tahun 2009, juga terkait dengan tambahan berupa stimulus fiskal terhadap perekonomian sebesar Rp73 triliun.

Dengan berbagai perubahan tersebut, pendapatan negara dan hibah diperkirakan turun dari Rp.985,7 triliun menjadi Rp.848,6 triliun. Penurunan pendapatan negara dan hibah tersebut, utamanya didorong oleh penurunan penerimaan perpajakan dari Rp.725,8 triliun menjadi Rp 661,8 triliun. Penurunan penerimaan perpajakan tersebut merupakan dampak dari perlambatan pertumbuhan ekonomi, penurunan harga minyak mentah Indonesia dan pemberian stimulus fiskal khususnya pemotongan pajak penghasilan pasal 21. Meskipun penerimaan perpajakan diperkirakan lebih rendah dari target APBN Tahun 2009, namun sedikit lebih tinggi dibanding realisasi APBN Tahun 2008. Penurunan pendapatan negara dan hibah didorong pula oleh penurunan penerimaan bukan pajak (PNBP) yang diperkirakan menurun dari Rp258,9 triliun menjadi Rp.185,9 triliun, yang disebabkan oleh perubahan asumsi harga minyak mentah Indonesia sebagai akibat dari turunnya harga minyak mentah dunia.

Sementara itu, disisi pengeluaran negara, alokasi belanja negara pada APBN Tahun 2009 diperkirakan meningkat sebesar Rp.51,8 triliun dibanding realisasi APBN Tahun 2008 dengan total belanja negara yang ditetapkan sebesar Rp.1.037,1 triliun (19,5 persen terhadap PDB), yang didorong oleh peningkatan belanja pemerintah pusat sebesar Rp.23,74 triliun dan alokasi belanja ke daerah sebesar Rp. 28,06 triliun bila dibandingkan dengan realisasi APBN tahun 2008. Namun demikian, besaran alokasi belanja negara yang telah ditetapkan dalam APBN Tahun 2009 diperkirakan turun sebesar Rp. 49,0 triliun (dari Rp1.037,1 triliun menjadi Rp. 988,1 triliun) pada APBN Penyesuaiannya. Penurunan belanja negara tersebut utamanya didorong oleh penurunan belanja subsidi Rp.43,2 triliun yang terdiri atas penurunan belanja subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) Rp.33,1 triliun, subsidi listrik Rp.3,5 triliun, dan subsidi pajak Rp. 7 triliun. Sementara itu, belanja ke daerah diperkirakan turun Rp.17,6 triliun. Penurunan belanja ke daerah sejalan dengan turunnya penerimaan yang dibagihasilkan khususnya penerimaan SDA migas dan penerimaan pajak penghasilan. Disisi lain, terdapat peningkatan belanja negara sebagai tambahan stimulus fiskal sebesar Rp.11,2 triliun yang

Disisi pengeluaran negara, alokasi belanja negara pada APBN Tahun 2009 diperkirakan meningkat dibanding realisasi APBN Tahun 2008

dialokasikan pada kegiatan infrastruktur dan realokasi dari Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan ASEI.

Berdasarkan perkembangan tersebut, defisit anggaran pada tahun 2009 diperkirakan meningkat dari Rp.51,3 triliun menjadi Rp.139,5 triliun atau menjadi 2,5 persen PDB. Peningkatan defisit anggaran tersebut, diperkirakan dibiayai melalui SILPA sebesar Rp.51,3 triliun dan tambahan pembiayaan utang sebesar Rp.44,5 triliun yang bersumber dari penarikan pinjaman siaga, serta tambahan penarikan pinjaman program sebesar Rp.1,1 triliun. Sementara itu stok utang pemerintah pada akhir tahun 2009 diperkirakan sebesar 31,3 persen terhadap PDB.

Terkait dengan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), sebagai salah satu pelaku dalam perekonomian nasional terus dibina agar semakin sehat dan mampu berdayasaing di kancah global. Pembinaan BUMN sejak tahun 2005 hingga 2009 meliputi: restrukturisasi, privatisasi, penyempurnaan infrastruktur hukum, pembinaan pelaksanaan tata-kelola yang baik, pembinaan pelaksanaan PSO, penambahan penyertaan modal negara (PMN), serta penyelesaian/restrukturisasi hutang BUMN. Langkah-langkah pembinaan tersebut menunjukkan kinerja yang semakin baik. Dari tahun 2005 hingga tahun 2007 jumlah BUMN yang merugi semakin sedikit yaitu 36 BUMN pada tahun 2005, menjadi 39 BUMN pada tahun 2006, dan 28 BUMN pada tahun 2007. Sejalan dengan itu, besarnya keuntungan yang diraih BUMN juga meningkat. Dengan demikian, bagian laba BUMN yang diserahkan ke kas negara juga meningkat, yaitu dari Rp. 12,8 triliun pada tahun 2005, menjadi Rp. 22,9 triliun pada tahun 2006, menjadi Rp. 23,2 triliun pada tahun 2007, dan meningkat menjadi Rp. 30,8 triliun pada tahun 2008.

Di sisi moneter, nilai tukar Rupiah yang sebelumnya sempat menguat dari Rp9.419,-/USD pada bulan Desember 2007 menjadi Rp9.118,-/USD pada bulan Juni 2008 didorong oleh peningkatan penerimaan ekspor dan pemasukan modal swasta. Selanjutnya, nilai tukar kemudian kembali melemah dan mencapai puncaknya menjadi Rp12.151,-/USD pada bulan November 2008 dan sedikit menguat menjadi Rp10.700,-/USD pada minggu ketiga April 2009.

Selama tahun 2008 inflasi mencapai 11,1 persen, yang dipengaruhi oleh perkembangan harga BBM di pasar internasional dan domestik serta harga bahan-bahan pokok. Inflasi mengalami penurunan pada akhir tahun 2008 dan awal tahun 2009 seiring dengan menurunnya harga bahan bakar internasional dan domestik serta bahan-bahan pokok lainnya. Inflasi bulan April 2008 sebesar 8,96 persen (*y-o-y*) meningkat menjadi 10,38 persen (*y-o-y*) pada bulan Mei 2008 seiring dengan kenaikan harga BBM domestik dan kenaikan harga bahan pangan pokok. Inflasi terus meningkat sehingga

pada bulan September 2008 mencapai 12,14 persen (*y-o-y*). Sejalan dengan menurunnya harga minyak mentah di pasar internasional dan domestik serta bahan-bahan pokok lainnya, inflasi menurun secara bertahap menjadi 11,77 persen (*y-o-y*) pada bulan Oktober 2008, 11,06 persen (*y-o-y*) pada bulan Desember 2008 dan 8,60 persen (*y-o-y*) pada bulan Februari 2009 dan 7,92 persen pada bulan Maret 2009. Dengan semakin stabilnya harga-harga bahan pokok di pasar internasional dan kebijakan pengendalian inflasi, diharapkan inflasi akan turun secara bertahap menjadi 5,0 persen (*y-o-y*) pada akhir tahun 2009.

Menurunnya inflasi pada akhir tahun 2008 memberikan cukup ruang bagi Bank Indonesia untuk melakukan perubahan kebijakan moneter yang semakin longgar. Kebijakan pengendalian moneter yang sebelumnya menegat, yaitu dengan menaikkan BI rate naik secara bertahap dari sebesar 8,0 persen pada bulan April 2008 menjadi 9,50 persen pada bulan Oktober 2008, kemudian dilonggarkan melalui penurunan BI rate menjadi 9,25 persen pada bulan Desember 2008, 8,75 persen pada bulan Januari 2009 dan 7,5 persen pada awal April 2009. Agar dapat menggerakkan kegiatan ekonomi, penurunan BI rate diharapkan dapat diikuti penurunan suku bunga perbankan.

Penurunan BI rate pada awal Desember 2008 belum diikuti oleh penurunan sukubunga perbankan dalam jangka pendek kecuali suku bunga deposito 1 bulan dan suku bunga kredit investasi, karena masih ketatnya likuiditas perbankan meskipun sudah mulai melonggar secara bertahap.

Sektor Keuangan. Meskipun kondisi perekonomian dunia mengalami guncangan yang sangat berat, namun ketahanan sektor perbankan Indonesia masih cukup kuat. Rasio kecukupan modal (*capital adequacy ratio – CAR*) bank umum sebesar 16,8 persen pada tahun 2008, masih jauh lebih tinggi dibandingkan ketentuan batas minimal 8,0 persen. Terkait dengan potensi kredit macet, tingkat kredit berkinerja buruk (*non performing loan – NPL*) bank umum turun menjadi 3,2 persen pada tahun 2008 dari 4,1 persen pada tahun 2007.

Di tengah-tengah krisis ekonomi dunia, pertumbuhan kredit perbankan nasional meningkat pesat. Sampai dengan Desember 2008 kredit tumbuh mencapai 30,7 persen dengan nilai Rp1.300,2 triliun, jauh lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan tahunan 2007 yang sebesar 26,4 persen (*y-o-y*). Di sisi penghimpunan dana, simpanan masyarakat pada bank tumbuh sebesar 16,2 persen (*y-o-y*) dari Rp1.528,2 triliun pada akhir 2007 menjadi Rp1775,2 triliun pada akhir 2008, lebih lambat dibandingkan akhir tahun 2007 yang tumbuh sebesar 17,7 persen (*y-o-y*). Seiring dengan perkembangan tersebut, rasio pinjaman terhadap simpanan (*loan to*

deposit ratio – *LDR*) naik dari 65,1 persen pada tahun 2007 menjadi 73,2 persen pada akhir 2008. Untuk sektor UMKM, kredit bank umum yang berskala mikro, kecil dan menengah (kredit UMKM) meningkat sebesar 26,1 persen (y-o-y) pada akhir 2008 dengan nilai Rp633,9 triliun yang terdistribusi 8,6 persen untuk kredit investasi; 39,0 persen untuk kredit modal kerja, dan 52,4 persen untuk kredit konsumsi.

Selain melalui sistem konvensional, pembiayaan melalui perbankan syariah juga terus meningkat. Pembiayaan melalui perbankan syariah tumbuh sebesar 36,5 persen (y-o-y) dari Rp28,0 triliun pada akhir 2007 menjadi Rp38,2 triliun pada 2008. Dilihat dari komposisinya, pembiayaan terbesar masih merupakan pembiayaan yang keuntungannya telah disepakati dahulu (piutang murabahah). Di sisi lain, penghimpunan dana masyarakat pada tahun 2008 tumbuh sebesar 31,6 persen (y-o-y) dari Rp28,0 triliun (2007) menjadi Rp36,9 triliun (2008). Terkait dengan fungsi intermediasi, rasio *LDR* perbankan syariah relatif stabil yaitu sekitar 103,0 persen. Pesatnya perkembangan perbankan syariah juga diikuti dengan membaiknya kualitas pembiayaan yang disalurkan. Rasio *non performing financing* (NPF) turun menjadi 3,9 persen (2008) dari 4,1 persen (2007).

Goncangan pasar modal internasional dengan *Wall Street* di Amerika Serikat sebagai episentrumnya secara cepat menular dan menular ke negara-negara lainnya, termasuk negara-negara anggota Uni Eropa, Jepang dan Cina sehingga berimbas pula kepada Bursa Efek Indonesia (BEI). Indeks harga saham gabungan (IHSG) BEI yang sedikit membaik pada awal tahun 2008 dari 2.627,3 pada bulan Januari 2008 menjadi 2.721,9 (3,6 persen) pada bulan Februari 2008, menurun secara bertahap menjadi 2.165,9 (minus 20,4 persen) pada bulan Agustus, dan menurun secara bergejolak menjadi 1.355,4 (minus 37,4 persen) pada bulan Desember 2008. Penurunan IHSG didorong pula oleh keluarnya sebagian investor asing dari bursa. Pada bulan Februari 2009 IHSG masih mengalami penurunan menjadi 1.296,9 (minus 4,3 persen). Pada minggu III April 2009 IHSG sudah mulai meningkat menjadi 1.625,09. Meskipun masih sulit diprediksi kapan krisis keuangan global ini akan berakhir, namun pada akhir tahun 2009 diharapkan pasar modal berkembang lebih stabil dan mengalami peningkatan jika upaya-upaya intervensi secara terkoordinasi dari seluruh negara-negara di dunia untuk menanggulangi krisis global tersebut terbukti efektif.

Terkait dengan kondisi eksternal yang tidak menentu, selama tahun 2008 telah ditetapkan kebijakan guna memperkuat ketahanan sektor keuangan domestik khususnya perbankan. Beberapa kebijakan penting perbankan yang dikeluarkan Pemerintah selama tahun 2008 antara lain adalah (i) memberikan bantuan bagi perbankan yang

mengalami kesulitan keuangan yang berdampak sistemik serta menimbulkan potensi krisis akan dibiayai oleh pemerintah melalui APBN¹; (ii) merubah besaran nilai simpanan yang dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS)² yang didahului oleh Perppu Nomor 3 tahun 2008 tentang Perubahan UU No 24 tentang Lembaga Penjamin Simpanan; serta (iii) membentuk landasan hukum bagi Jaring Pengaman Sektor Keuangan³. Seiring dengan langkah-langkah kebijakan yang dilakukan Pemerintah di dalam penanganan sektor keuangan tersebut, Bank Indonesia mengeluarkan kebijakan yang terkait dengan sektor keuangan yang antara lain adalah fleksibilitas di dalam pengaturan Giro Wajib Minimum (GWM)⁴.

Selanjutnya, lembaga keuangan non bank (LKNB) termasuk pasar modal telah menunjukkan perkembangan yang cukup baik. Kepercayaan masyarakat terhadap LKNB sudah semakin baik, yang ditunjukkan oleh meningkatnya aset lembaga keuangan non bank (asuransi, dana pensiun, perusahaan pembiayaan, dan modal ventura) sebesar 23,2 persen (yoy) dari Rp369,9 triliun (2006) menjadi Rp455,8 triliun (2007), lebih tinggi dari pertumbuhan tahun 2006 yang sebesar 20,3 persen (y-o-y). Namun demikian, terkait dengan gejolak krisis keuangan dunia, nilai kapitalisasi pasar modal terhadap PDB menurun dari 64,4 persen PDB pada tahun 2007 menjadi 33,8 persen PDB.

2.3.2 Dampak terhadap Pertumbuhan Sektor Riil

A. Dampak Terhadap Bidang Infrastruktur

Sektor Transportasi. Transportasi merupakan penggerak perekonomian masyarakat. Pada daerah yang telah berkembang, pelayanan transportasi dapat meningkatkan kegiatan ekonomi. Kondisi pelayanan transportasi yang memadai dapat mengurangi biaya transportasi yang akhirnya dapat menurunkan biaya produksi dan biaya distribusi. Demikian pula transportasi juga dapat merupakan penggerak kegiatan ekonomi di daerah. Ketersediaan prasarana transportasi dapat berfungsi memperlancar kegiatan ekonomi masyarakat terutama dalam memasarkan produk-produk masyarakat setempat ke daerah pemasaran

Dampak krisis pada sektor transportasi terlihat dari semakin tidak terpenuhinya kebutuhan pemeliharaan dan rehabilitasi infrastruktur transportasi

¹ Perppu Nomor 2 tahun 2008 tentang Perubahan terhadap UU Nomor 23 tahun 1998 tentang Bank Indonesia

² PP nomor 66 tahun 2008

³ Perppu Nomor 4 tahun 2008 tentang Jaring Pengaman Sektor Keuangan

⁴ Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 10/25/PBI/2008 tentang Perubahan PBI nomor 10/19/PBI/2008 tentang Giro Wajib Minimum Bank Umum pada Bank Indonesia dalam Rupiah dan Valuta Asing menetapkan bahwa GWM Rupiah Bank Umum sebesar 7,5% yang terdiri dari GWM Utama sebesar 5,0% dan Sekunder sebesar 2,5%. GWM Utama terdiri dari rekening simpanan Rupiah bank umum pada Bank Indonesia dan GWM Sekunder terdiri dari SBI, SUN atau *excess reserve*.

lokal. Demikian pula transportasi juga dapat menggerakkan kegiatan pemerintahan di daerah.

Krisis keuangan global, berdasarkan pengalaman-pengalaman negara-negara lain, berdampak pada menurunnya kemampuan pendanaan pemerintah serta daya beli masyarakat. Kemampuan pemerintah dalam penyediaan anggaran akan jauh berkurang dibandingkan masa sebelum krisis yang diindikasikan dengan semakin tidak terpenuhinya kebutuhan pemeliharaan dan rehabilitasi infrastruktur transportasi. Di sisi lain terjadi kenaikan biaya transportasi akibat terdepresiasi nilai rupiah dan inflasi. Dampak dari hal tersebut di atas adalah terjadinya penurunan tingkat kinerja infrastruktur transportasi dalam mendukung kegiatan ekonomi. Penurunan tingkat keselamatan, kelancaran distribusi, dan terhambatnya hubungan dari satu daerah ke daerah yang lain. Keadaan tersebut menyebabkan biaya angkut dan biaya produksi yang lebih mahal dari yang seharusnya, sehingga berdampak pada meningkatnya harga jual barang dan jasa yang akhirnya akan membebani masyarakat. Dari sisi lain, terhambatnya transportasi antarwilayah akan mengurangi peluang terjadinya perdagangan antarwilayah yang dapat mengurangi perbedaan harga antarwilayah. Hambatan transportasi juga menurunkan mobilitas tenaga kerja sehingga meningkatkan konsentrasi keahlian dan keterampilan pada beberapa lokasi wilayah tertentu saja. Ketidakmerataan keterampilan dan keahlian, dan adanya perbedaan biaya mendorong terciptanya kesenjangan pembangunan antarwilayah.

Pembangunan infrastruktur dapat juga dilihat sebagai salah satu alternatif pemulihan pertumbuhan ekonomi, dimana Pembangunan kembali infrastruktur akan menyerap banyak tenaga kerja, membangkitkan sektor riil, dan memicu produksi dan konsumsi masyarakat

Sudah saatnya kita melihat infrastruktur sebagai salah satu alternatif bagi pemulihan pertumbuhan ekonomi. Pembangunan kembali infrastruktur akan menyerap banyak tenaga kerja, membangkitkan sektor riil, dan memicu produksi dan konsumsi masyarakat. Pembangunan infrastruktur dapat mengurangi kesenjangan antar daerah serta mengurangi kemiskinan. Namun demikian, pembangunan infrastruktur ke depan harus menggunakan paradigma baru, berwawasan lingkungan, dan menggunakan pendekatan kewilayahan (*regional-based*).

Ketika Indonesia masih berupaya keluar dari krisis, pertanyaan yang relevan dikemukakan adalah seberapa jauh pembangunan infrastruktur dapat digunakan sebagai salah satu instrumen untuk menyelesaikan krisis, dan langkah-langkah yang harus segera diambil. Pada hakekatnya pembangunan infrastruktur masih menjadi tanggungjawab pemerintah, baik sebagai bentuk pelayanan publik maupun sebagai instrumen pemerintah dalam mendukung lancarnya roda perekonomian negara. Dalam perjalanan pembangunan bangsa, sebagian peran tersebut dapat dijalankan oleh BUMN dan swasta untuk memberikan pelayanan infrastruktur kepada masyarakat. Pelaksanaan

pelayanan ini dalam keadaan tertentu membutuhkan subsidi dari pemerintah, namun disisi lain BUMN dan swasta dapat menciptakan margin dari tarif yang dibebankan kepada pengguna untuk dapat menutupi defisit pendanaan yang diperlukan.

Sektor Perumahan dan Permukiman. Terdapat 3 dampak utama yang dirasakan akibat krisis global yang terkait dengan sektor perumahan dan permukiman, yaitu (1) mengeringnya likuiditas, yang tidak hanya mempengaruhi dunia usaha, melainkan kepada pemerintah untuk membiayai pembangunan; (2) menurunnya tingkat permintaan dan komoditas-komoditas utama ekspor Indonesia tanpa diimbangi peredaman laju impor secara signifikan yang menyebabkan defisit perdagangan; dan (3) menurunnya tingkat kepercayaan konsumen, investor dan pasar terhadap berbagai institusi keuangan yang ada.

Dampak krisis pada sektor perumahan dan permukiman adalah mengeringnya likuiditas, menurunnya permintaan, dan tingkat kepercayaan konsumen, investor dan pasar terhadap institusi keuangan

Pengurangan likuiditas akibat krisis global berdampak pada ketersediaan anggaran pemerintah untuk pembangunan perumahan dan permukiman. Beban berat yang dipikul oleh dunia usaha akibat krisis global menyebabkan intervensi pemerintah menjadi sangat diperlukan yang hingga saat ini sumber pendanaan pembangunan sektor perumahan dan permukiman masih didominasi oleh anggaran pemerintah. Padahal, prioritas pemerintah terhadap sektor perumahan dan permukiman (air minum, air limbah, persampahan dan drainase) dirasakan masih sangat rendah. Kondisi ini dapat meningkatkan kesenjangan antara kebutuhan masyarakat, terutama masyarakat berpenghasilan rendah, terhadap perumahan beserta prasarana dan sarana pendukungnya dengan upaya pemenuhan terhadap kebutuhan tersebut. Dampak ini akan semakin terasa pada kawasan perkotaan dengan kepadatan penduduk yang tinggi dan dihuni oleh masyarakat berpenghasilan rendah sehingga dapat menumbuhkan kawasan-kawasan kumuh perkotaan.

Tekanan likuiditas juga dapat terjadi pada sektor perbankan Indonesia. Untuk menekan tingkat inflasi, Bank Indonesia telah menurunkan suku bunga BI rate hingga menjadi 8,25% pada Februari 2009. Penurunan BI rate ini direspon oleh pergerakan suku bunga deposito dan suku bunga kredit. Namun dikemudian hari, penurunan SBI ini dikhawatirkan dapat mengakibatkan penurunan DPK (dana pihak ketiga) yang pada akhirnya dapat mempengaruhi jumlah kredit yang dapat dikucurkan baik untuk kegiatan konstruksi maupun bagi kredit bagi konsumen. Hal ini terjadi karena sumber utama pemodal bank penyalur kredit hingga saat ini masih bertumpu pada DPK dibandingkan dengan sumber pendanaan jangka panjang lainnya.

Pada sektor perumahan, penurunan DPK dapat memicu penurunan kredit yang dikeluarkan perbankan bagi pengembang untuk pembangunan

rumah (baik *landed house* maupun *multistorey housing*) sehingga menurunkan *supply* perumahan bagi masyarakat. Dari segi *demand*, penurunan DPK juga dapat mempengaruhi jumlah kredit kepemilikan rumah (KPR) yang disalurkan bagi masyarakat. Padahal, hampir 50% masyarakat Indonesia yang berencana untuk memiliki rumah menggunakan angsuran (melalui KPR) sebagai rencana pembiayaan kepemilikan rumah.

Upaya penanganan terhadap penurunan DPK yang berisiko terhadap pengurangan penyaluran kredit perumahan telah dilakukan melalui pengembangan pasar sekunder perumahan. Pada awal Februari 2009 yang lalu, PT Sarana Multigriya Finansial, sebagai perusahaan yang ditunjuk oleh Departemen Keuangan untuk mengembangkan pasar sekunder perumahan, telah berhasil menerbitkan Efek Beragun Aset (EBA) yang dinamai EBA Danareksa SMF I-KPR BTN Kelas A senilai Rp.100.000.000.000,- (seratus milyar rupiah). Penerbitan instrumen pasar modal ini merupakan langkah yang diambil pemerintah guna meningkatkan likuiditas perbankan, khususnya Bank BTN agar mampu melakukan ekspansi kredit, baik kredit konstruksi maupun kredit kepemilikan rumah. Namun, menurunnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap institusi dan instrumen keuangan dikhawatirkan mempengaruhi penjualan instrumen EBA di pasar modal yang pada akhirnya dapat mempengaruhi aksesibilitas masyarakat terhadap kepemilikan rumah.

Penurunan tingkat permintaan dan komoditas-komoditas utama ekspor Indonesia mengakibatkan pengerutan sektor riil yang berlanjut kepada kenaikan PHK dan penurunan daya beli masyarakat. Hal ini dapat berakibat pada menurunnya *demand* terhadap perumahan dan permukiman. Kebutuhan masyarakat terhadap perumahan akan menurun drastis serta kemampuan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan air minum dan sanitasi juga semakin berkurang yang dapat berakibat pada kesehatan masyarakat, kesejahteraan masyarakat dan kualitas lingkungan permukiman.

B. Dampak terhadap Bidang Pertanian dan Perkebunan

Dampak krisis pada bidang pertanian dan perkebunan relatif kecil yang lebih disebabkan oleh sisi permintaan akibat turunnya volume ekspor bukan karena faktor keuangan financial

Sektor pertanian relatif kecil terkena dampak krisis ekonomi dibandingkan dengan sektor lain. Dampak krisis kepada sektor pertanian lebih disebabkan dari sisi permintaan (*demand side*), dan bukan karena faktor keuangan finansial. Saat krisis ekonomi terjadi, justru sektor pertanian masih menjadi salah satu sektor yang diandalkan untuk penciptaan lapangan pekerjaan.

Krisis keuangan yang bermula di Amerika Serikat pada pertengahan tahun 2008, menyebabkan turunnya permintaan barang secara agregat di negara tersebut. Penurunan tersebut ternyata

berdampak kepada turunnya volume impor Amerika Serikat, dan di sisi lain menyebabkan turunnya volume ekspor dari negara eksportir. Kondisi ini juga berdampak bagi Indonesia, yaitu dengan menurunnya volume ekspor Indonesia dimana salah satunya adalah komoditas pertanian.

Sementara itu, dari sisi *on-farm*, turunnya volume ekspor komoditas pertanian menyebabkan semakin berkurangnya permintaan terhadap produk petani sehingga harga komoditas pertanian menurun. Namun demikian, dampak dari krisis ekonomi tersebut tidak terjadi pada keseluruhan komoditas pertanian, tetapi lebih kepada komoditas ekspor utama, seperti kelapa sawit/CPO, kakao, dan karet.

Komoditas Pangan. Produksi komoditas pangan nasional pada tahun 2008, dimana saat krisis ekonomi terjadi, secara rata-rata tetap menunjukkan peningkatan. Bahkan, apabila dibandingkan produksi tahun 2007, jumlah peningkatannya cukup besar. Beras/padi sebagai komoditas pangan utama, produksi pada tahun 2008 mencapai 60,28 juta ton gabah kering giling (GKG) atau meningkat 5,46 persen dibandingkan tahun 2007. Demikian juga untuk jagung dan kedelai, produksi pada tahun 2008 meningkat masing-masing menjadi 15,86 juta dan 761 ribu ton atau meningkat 19,36 dan 28,47 persen dibandingkan tahun 2007.

Komoditas pangan nasional disaat krisis ini secara rata-rata tetap menunjukkan trend peningkatan dan dalam kisaran harga yang cukup stabil

Sementara itu, harga beras dalam negeri relatif stabil dibandingkan harga beras internasional. Harga beras jenis umum pada tahun 2008 adalah Rp. 6.366,- per kg atau naik 4,95 persen dibandingkan tahun 2007 dimana harga rata-ratanya adalah Rp. 6.066,- per kg. Kondisi ini menunjukkan bahwa harga beras dalam negeri tidak terpengaruh dengan fluktuasi harga beras internasional, dimana pada pertengahan tahun 2008 harganya meningkat cukup tajam. Demikian juga untuk harga kedelai, secara rata-rata harganya mencapai Rp. 8.296,- per kg, dimana pada awal tahun (bulan Februari) harganya Rp. 7.948,- dan pada akhir tahun Rp. 8.368,- atau relatif hanya meningkat 5,28 persen. Stabilitasnya harga kedua jenis komoditas pangan tersebut disebabkan relatif tingginya produksi nasional sehingga ketersediaan (*supply*) dari kedua komoditas tersebut relatif mencukupi kebutuhan (*demand*) nasional.

Melihat kondisi tersebut di atas, menunjukkan bahwa krisis keuangan global ternyata tidak berpengaruh secara signifikan terhadap produksi dan harga pangan dalam negeri. Dengan demikian, pendapatan petani dari usahatani komoditas pangan relatif tidak terpengaruh dengan krisis tersebut. Salah satu indikator yang dapat menunjukkan hal tersebut adalah Nilai Tukar Petani (NTP) yang secara rata-rata pada tahun 2008 justru meningkat menjadi 110,00 atau naik 2,80 persen dibandingkan tahun 2007. Nilai tersebut menunjukkan bahwa pendapatan petani dari

aktivitas usahataniya relatif lebih besar dibandingkan biaya yang harus dikeluarkan petani.

Dampak krisis menyebabkan pengurangan jumlah tenaga kerja yang berakibat pada turunnya daya beli masyarakat dan akses terhadap pangan

Krisis ekonomi justru berdampak terhadap *demand side* dari komoditas pangan tersebut. Terkait dengan krisis keuangan yang terjadi, telah menyebabkan sebagian industri yang berbasis ekspor mengurangi jumlah tenaga kerjanya. Kondisi ini akan menyebabkan daya beli sebagian masyarakat yang kehilangan pekerjaan menurun, sehingga mengurangi akses terhadap pangan. Apabila hal ini dibiarkan, maka akan berpotensi menyebabkan rawan pangan di masyarakat.

Dampak krisis pada komoditas perkebunan terasa paling rentan karena komoditas ini sangat berorientasi ekspor dan diperdagangkan secara internasional

Komoditas Perkebunan. Komoditas perkebunan merupakan komoditas yang paling rentan terhadap krisis keuangan global. Hal ini tidak terlepas dari sifat komoditas perkebunan yang berorientasi ekspor dan diperdagangkan secara internasional. Harga komoditas perkebunan tidak hanya dipengaruhi dengan jumlah permintaan dan penawaran, namun juga sangat rentan dengan aksi spekulasi yang muncul di dalam pasar komoditas tersebut. Dengan demikian, hal yang perlu diperhatikan dalam perdagangan komoditas perkebunan di pasar internasional adalah perkembangan ekonomi negara pengimpor serta tindakan spekulasi yang menyebabkan fluktuasi dan ketidakpastian harga. Hal ini akan membahayakan kelangsungan usaha komoditas primer serta kesulitan dalam perencanaan usaha.

Sejak tahun 2004, baik produksi maupun luas area perkebunan terus menunjukkan kenaikan dengan penyerapan tenaga kerja pada tahun 2008 diperkirakan sekitar 19,96 juta orang. Membaiknya sub sektor perkebunan juga tidak terlepas dari membaiknya harga dunia komoditas perkebunan sehingga produk perkebunan Indonesia dapat bersaing dengan komoditas negara lain. Namun, ketika krisis ekonomi terjadi pada tahun 2008, harga komoditas perkebunan di pasar internasional mulai turun. Harga CPO *Cif Rotterdam* pada bulan Juli 2008 yang sempat mencapai US\$ 1.200 per ton turun menjadi hanya US\$ 700 per ton minggu kedua bulan Oktober 2008. Sementara itu, harga karet di Kuala Lumpur pada akhir bulan Juni mencapai US\$ 3,3 per kg turun menjadi US\$ 2,2 per kg pada minggu kedua bulan Oktober 2008.

Krisis ekonomi yang dialami oleh negara importir menyebabkan negara tersebut menunda, bahkan menghentikan kontrak perdagangan komoditas perkebunan. Walaupun nilai tukar rupiah mengalami depresiasi terhadap dolar Amerika, namun penurunan harga komoditas yang relatif besar menyebabkan ancaman bagi kelangsungan pengembangan perkebunan di Indonesia. Terlebih dengan naiknya biaya produksi yang melebihi harga, menyebabkan petani banyak yang merugi.

Sementara itu, turunnya harga komoditas perkebunan di pasar internasional, ternyata tidak terlalu berpengaruh terhadap harga beberapa komoditas olahan dalam negeri. Harga gula pasir dalam negeri secara rata-rata pada tahun 2008 adalah Rp. 6.510,- per kg. Pada awal tahun harga gula pasir mencapai Rp. 6.488,- dan pada akhir tahun menjadi Rp. 6.544,- atau hanya meningkat 0,86 persen. Sementara untuk harga minyak goreng cenderung berfluktuasi. Harga minyak goreng jenis curah secara rata-rata mencapai Rp. 10.023,- per liter. Pada awal tahun harga minyak goreng jenis curah mencapai Rp. 9.471,-, selanjutnya pada bulan Juni mencapai Rp. 11.620,- dan pada akhir tahun turun kembali menjadi Rp. 7.788,-. Sedangkan untuk harga rata-rata minyak goreng jenis kemasan mencapai Rp. 12.516,- per liter, dimana pada awal tahun harganya mencapai Rp. 10.772,-, pada bulan Juni meningkat menjadi Rp. 13.078,- dan pada akhir tahun turun menjadi Rp. 11.720,-.

Turunnya harga komoditas perkebunan di pasar internasional tidak terlalu berpengaruh terhadap harga komoditas di dalam negeri

Komoditas Hortikultura. Tanaman hortikultura berfungsi sebagai fungsi pangan (sumber vitamin, mineral, serat, antioksidan, energi), fungsi ekonomi, fungsi kesehatan, serta fungsi budaya. Namun demikian, meski memiliki peranan penting, konsumsi sayuran masyarakat Indonesia masih kurang dibandingkan dengan anjuran konsumsi seharusnya. Pada tahun 2003 misalnya, konsumsi sayuran per kapita per tahun hanya 28,00 kg dari anjuran sebanyak 62,50 kg. Demikian juga dengan konsumsi buah pada tahun tersebut hanya 49 kg buah per kapita per tahun atau lebih rendah dari anjuran sebanyak 62,5 kg.

Terjadinya krisis ekonomi pada pertengahan tahun 2008 relatif tidak berdampak signifikan terhadap komoditas hortikultura. Hal ini terlihat dari perkembangan produksi dan luasan panen tanaman hortikultura pada tahun tersebut. Sejak tahun 2004 sampai dengan 2008, sisi produksi tanaman hortikultura selalu mengalami peningkatan. Demikian juga dengan luasan panen yang cenderung meningkat, kecuali untuk tanaman hias yang cenderung mengalami penurunan. Sementara itu, selama 2004-2007 terdapat kecenderungan impor produk sayuran dan buah-buahan meningkat. Maraknya buah-buahan dan sayuran impor ini selain karena permintaan dalam negeri yang masih tinggi juga kecenderungan harganya yang murah dan kualitas yang lebih bagus dibanding dengan komoditas lokal.

Dampak krisis pada komoditas hortikultura tidak berpengaruh signifikan karena permintaan dalam negeri yang masih cukup tinggi

Komoditas Peternakan dan Hasil Turunannya. Krisis keuangan global yang terjadi pada tahun 2008 tidak berpengaruh signifikan terhadap komoditas peternakan dan hasil turunannya di dalam pasar dalam negeri. Kondisi ini terlihat dari jumlah populasi ternak dan produksi hasil ternak yang cenderung meningkat, serta relatif stabilnya harga dalam negeri walaupun menunjukkan tren peningkatan pada akhir tahun.

Dampak krisis pada komoditas peternakan tidak berpengaruh secara signifikan namun pemenuhan pakan ternak yang masih mengandalkan impor akan cukup berpengaruh bila kita tidak mengurangi ketergantungan akan pakan impor

Populasi ternak pada tahun 2008 secara rata-rata meningkat. Populasi ternak ruminansia, yaitu sapi potong, sapi perah, kerbau, kambing, dan domba masing-masing jumlahnya mencapai 11,87 juta, 408 ribu; 2,19 juta; 15,81 juta; dan 10,39 juta ekor atau rata-rata meningkat antara tiga sampai sembilan persen dibandingkan tahun 2007. Demikian juga untuk jenis unggas, seperti ayam buras, ayam ras petelur, dan ayam ras pedaging, populasinya masing-masing mencapai 290,80 juta; 116,47 juta; dan 1075,89 juta ekor atau rata-rata meningkat empat sampai dengan 20 persen dibandingkan populasi unggas tahun 2007. Sementara itu, produksi hasil ternak turunan, seperti daging, telur, dan susu, juga meningkat pada tahun 2008, dimana masing-masing mencapai 2,17 juta; 1,48 juta; dan 574 ribu ton atau rata-rata meningkat satu sampai dengan tujuh persen dibandingkan produksi tahun 2007.

Walaupun jumlah populasi dan produksi hasil ternak terus meningkat, namun dengan terjadinya krisis ekonomi, dampak yang akan dihadapi lebih disebabkan oleh pemenuhan pakan ternak yang masih mengandalkan impor. Kenaikan harga jagung di pasar internasional telah menyebabkan biaya untuk pembelian pakan ternak juga meningkat. Produksi jagung dalam negeri yang semakin meningkat diharapkan dapat membantu mengurangi ketergantungan terhadap pakan impor. Namun karena laju permintaan terhadap konsumsi jagung yang tumbuh lebih cepat untuk keperluan pangan (*food*), Indonesia masih harus mengandalkan jagung impor dalam jumlah yang cukup besar.

Sementara itu, harga dalam negeri untuk komoditas hasil ternak selama tahun 2008 menunjukkan kecenderungan meningkat pada akhir tahun. Secara rata-rata, harga daging ayam ras, daging sapi, dan telur ayam ras masing-masing adalah Rp. 24.856; Rp. 53.868; dan Rp. 13.529,-. Peningkatan harga di akhir tahun, diduga lebih disebabkan oleh meningkatnya permintaan daging dan telur pada saat hari besar keagamaan dan bukan pengaruh dari krisis keuangan global.

C. Dampak terhadap Bidang Kelautan dan Perikanan

Dampak krisis pada produk perikanan sedikit terasa akibat penurunan permintaan ekspor namun tidak akan berpengaruh sejauh permintaan dalam negeri cukup tinggi dan produksi perikanan juga meningkat

Krisis keuangan yang dimulai dari Amerika Serikat dapat berdampak terhadap produk perikanan walaupun belum terasa signifikan di sektor perikanan. Berdasarkan hasil ekspor perikanan, terdapat kenaikan nilai ekspor hasil perikanan dari US \$ 2,259 miliar pada tahun 2007 menjadi US \$ 2,410 miliar pada tahun 2008, yang terutama diekspor ke negara Amerika Serikat, Jepang dan EU. Khusus untuk Amerika Serikat, produk utama adalah udang (55%), ikan laut non tuna (30%) dan tuna (10%). Namun demikian, terjadi penurunan volume ekspor produk perikanan yaitu dari 845 ribu ton pada tahun 2007 menjadi 745 ribu ton pada tahun 2008. Sementara itu, dari sisi produksi perikanan terdapat

peningkatan dari 8,24 juta ton pada tahun 2007 menjadi 8,71 juta ton pada tahun 2008. Peningkatan produksi perikanan ini terutama dikontribusi oleh perikanan budidaya. Penyediaan ikan untuk konsumsi juga mengalami peningkatan, dari 28,28 kg/kap/th pada tahun 2007 menjadi 29,98 kg/kap/th pada tahun 2008.

D. Dampak terhadap Bidang Kehutanan

Lahan yang luas dan kekayaan sumber daya alam yang beragam merupakan potensi yang dimiliki negara Indonesia untuk mendukung dan mewujudkan pembangunan. Namun pada kenyataannya pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya alam dan lahan masih belum optimal dalam mewujudkan kesejahteraan dan mengatasi kemiskinan. Salah satu permasalahan yang terjadi adalah adanya konflik kepemilikan lahan serta perambahan sumber daya alam yang tidak berorientasi ekologis.

Hutan sebagai salah satu bagian yang sangat penting bagi negara kita. Menurut angka resmi luas kawasan hutan Indonesia adalah 120 juta hektar. Namun luas hutan yang sebenarnya ada hanya 90 juta hektar. Jadi hanya 75 persen luas kawasan hutan. Hutan ini pun banyak yang mengalami kerusakan. Hal ini ditandai dengan angka laju deforestasi sebesar 1,08 juta hektare setiap tahun.

Peran ekonomi hutan seringkali ditempatkan sebagai ujung tombak pemulihan ekonomi ketika mengalami krisis. Hutan memang merupakan sumber daya dan karena itu dapat dibenarkan pemanfaatannya untuk pembangunan ekonomi. Namun yang menjadi permasalahan kemudian adalah bukanlah pemanfaatannya melainkan cara pemanfaatannya. Terjadi laju pembalakan hutan yang sangat tinggi dengan alasan pembangunan ekonomi menjadi sangat mengkhawatirkan, ditambah lagi sistem pengawasan pemanfaatan hutan pun sangat tidak memadai. Bahkan eksploitasi berlebihan (*overexploitation*) mendapatkan insentif dengan dapat diubahnya status hutan yang *overexploitation* menjadi hutan rusak yang dapat dijadikan Hutan Tanaman Industri (HTI) dengan kredit yang menggiurkan. Fasilitas kredit yang menarik juga tersedia untuk mengubahnya menjadi perkebunan seperti misalnya kelapa sawit.

Krisis ekonomi dapat menimbulkan dampak baik positif maupun negatif terhadap sumber penghidupan masyarakat yang tinggal di hutan dan sekitarnya. Inflasi dan meningkatnya biaya hidup serta input pertanian, misalnya, akan menimbulkan kemunduran bagi banyak rumah tangga. Walaupun demikian, sumber penghidupan mungkin membaik karena perkembangan-perkembangan seperti meningkatnya keuntungan dari tanaman ekspor. Runtuhnya hukum dan ketertiban selama krisis,

Bidang kehutanan merupakan bidang yang ditempatkan sebagai ujung tombak pemulihan ekonomi dalam masa krisis melalui pemanfaatannya yang arif dan bijaksana untuk pembangunan ekonomi

seperti yang terjadi di Indonesia, juga merupakan faktor pendukung yang bersifat negatif maupun positif. Tutupan hutan alam pun dapat mendatangkan keuntungan atau sebaliknya menjadi rusak akibat dampak krisis ekonomi. Bila keuntungan dari tanaman ekspor meningkat, lebih banyak lahan hutan yang mungkin dikonversi untuk lahan pertanian, demikian pula keuntungan dari ekspor hasil hutan yang lebih besar dapat menyebabkan eksploitasi yang lebih besar terhadap hutan dan sumber dayanya.

Tidak dapat dipungkiri bahwa pemanfaatan hutan secara berlebihan tersebut telah memberi sumbangan yang berarti pada peningkatan GNP Indonesia sehingga mengangkat negara Indonesia dari kelompok negara miskin menjadi kelompok negara berpendapatan menengah. Namun dampak kerusakan hutan yang kemudian terjadi tidak hanya terkait masalah kehutanan saja namun juga terkait dengan sektor kehidupan lainnya seperti kesehatan, pertanian, perikanan, permukiman, lingkungan hidup (banjir dan kekurangan air) serta perekonomian. Dampak ini pun tidak saja bersifat lokal, melainkan pula bersifat nasional, bahkan global.

E. Dampak terhadap Bidang Lingkungan Hidup

Dampak krisis pada bidang lingkungan hidup lebih disebabkan oleh akumulasi perubahan iklim termasuk dampak akibat penjarahan penduduk untuk bertahan hidup

Krisis ekonomi tahun 2008 terjadi di tengah krisis lingkungan, yang meliputi krisis energi, air, pangan dan dampak dari akumulasi perubahan iklim. Kondisi ini akan berdampak terhadap kebutuhan untuk menata lingkungan, menurunkan karbondioksida di atmosfer dan berinvestasi untuk energi ramah lingkungan akan mengakibatkan ongkos energi naik 20 persen dan barang-barang bertambah mahal.

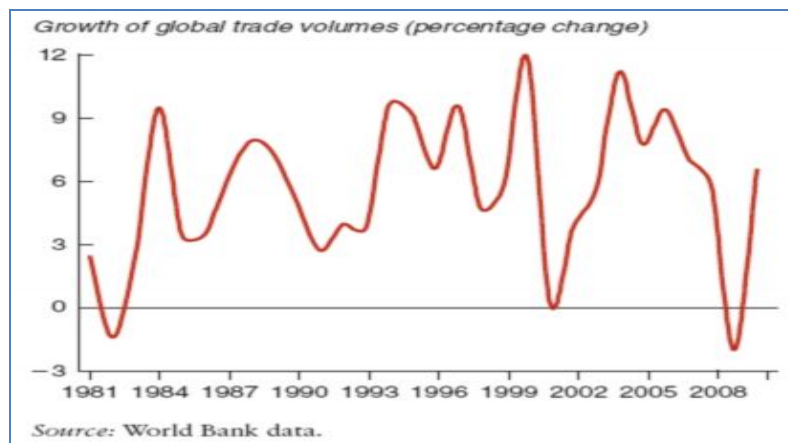
Sementara itu, krisis kelangsungan hidup menyebabkan kerusakan ekologi dan rusaknya jaminan terpenuhinya kebutuhan pokok/dasar telah mencapai tingkat yang tidak terpulihkan. Krisis ini berdampak bagi Penduduk yang berusaha bertahan hidup tidak berfikir panjang tentang kondisi bumi tempat mereka tinggal. Hutan, laut, tambang atau sumber daya alam apapun dijarah untuk pemenuhan kebutuhan dasar. Eksploitasi alam yang telah terjadi mengakibatkan kualitas SDA & Lingkungan menurun (kualitas tanah semakin menurun, pencemaran air, dan penurunan sepertiga keanekaragaman hayati sejak tahun 1970 (WWF, 2005).

F. Dampak terhadap Bidang Perdagangan

Pelemahan Perdagangan Global. Pelemahan permintaan dunia sebagai dampak krisis keuangan global diperkirakan akan berlangsung di tahun 2009, tentunya akan berdampak terhadap penurunan volume perdagangan dunia. Hal ini merupakan kejadian pertama kali setelah tahun 1982 (Gambar 2.2) berdasarkan Global Economic Prospect 2009 (Bank Dunia, Desember 2008).

Dampak krisis pada bidang perdagangan dan industri terlihat pada penurunan volume perdagangan dunia

Gambar 2.2. Pertumbuhan Volume Perdagangan Global



Sumber: World Bank GEP 2009

Tabel 2.1. Data dan Proyeksi Pertumbuhan Beberapa Indikator Ekonomi 2009 dan 2010

INDIKATOR	2007	2008	2009	2010
WORLD BANK (2009)				
• Pertumbuhan PDB Riil Dunia (%)	3,7	2,5	0,9	3,0
• Pertumbuhan volume perdagangan dunia (%)	7,5	6,2	-2,1	6,0
• Pertumbuhan harga komoditas, non-oil (%)	17,0	22,4	-23,2	-4,3
• Harga minyak dunia (USD per barrel)	71,1	101,2	74,5	75,8
IMF (2009)				
• Pertumbuhan output dunia (%)	5,2	3,4	0,5	3,0
• Pertumbuhan volume perdagangan dunia (%)	7,2	4,1	-2,8	3,2
• Pertumbuhan ekspor negara berkembang (<i>emerging and developing countries</i>), (%)	9,6	5,6	-0,8	5,4
• Pertumbuhan ekspor negara maju (%)	5,9	3,1	-3,7	2,1
• Pertumbuhan impor negara maju (%)	4,5	1,5	-3,1	1,9
• Pertumbuhan impor negara berkembang (%)	14,5	10,4	-2,2	5,8

Sumber: World Bank (*Global Economic Prospect*, Jan 2009) dan IMF (*World Economic Outlook-Update*, Jan 2009)

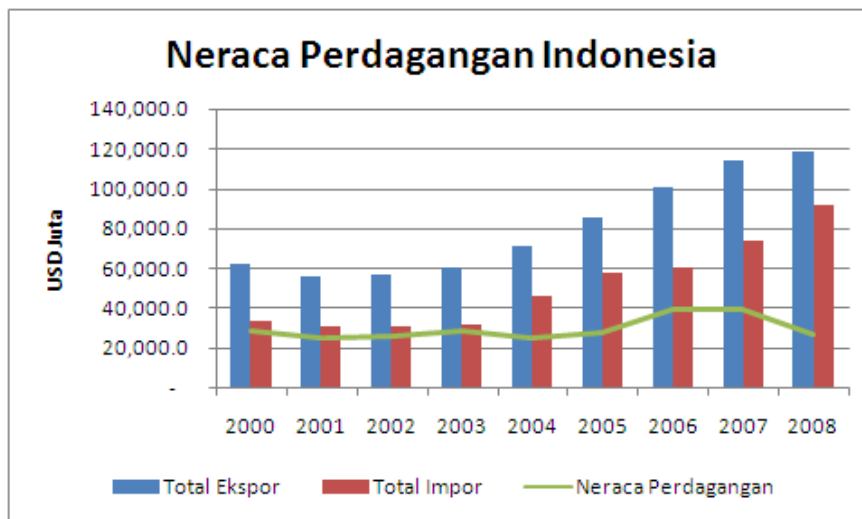
Tabel 2.1 menunjukkan bahwa dampak dari krisis global sebenarnya sudah mulai terlihat sejak tahun 2008. PDB riil dunia pada tahun 2008 terlihat lebih lambat dibandingkan dengan tahun sebelumnya, dan perlambatan ini diperkirakan akan terus berlangsung di tahun 2009. Bank Dunia memperkirakan pertumbuhan ekonomi dunia pada tahun 2009 hanya akan sebesar 0,9 persen; sedangkan IMF memperkirakan hanya sebesar 0,5 persen. Melemahnya pertumbuhan ekonomi ini akan mengakibatkan penurunan permintaan, sehingga volume perdagangan dunia pun akan mengalami penyusutan yang cukup berarti. Perlambatan volume perdagangan dunia sudah mulai terlihat di tahun 2008, dan di tahun 2009 diperkirakan terjadi penurunan volume perdagangan hingga lebih dari 2 persen. Penurunan ekspor dan impor dari negara maju di tahun 2009 akan menjadi pemicu utama penurunan ekspor negara-negara berkembang, yang merupakan konsumen utama dari produk-produk ekspor negara berkembang.

Berdasarkan perkiraan Bank Dunia (2009) dan IMF (2009), pertumbuhan volume perdagangan dunia di tahun 2010 diperkirakan akan lebih baik dibandingkan dengan tahun 2009, seiring dengan pertumbuhan ekonomi dunia di tahun 2010 yang lebih tinggi dibandingkan dengan tahun 2009.

Ke depan, tantangan terbesar yang akan dihadapi oleh Indonesia adalah semakin melemahnya pertumbuhan ekonomi dunia sebagai dampak lanjutan dari krisis global, yang akan berakibat pada melemahnya permintaan dunia. Akibatnya, tingkat persaingan produk ekspor di pasar global akan semakin runcing dan harga komoditas pun diperkirakan akan lebih rendah dari tahun 2008, karena menurunnya permintaan dunia dan aktivitas produksi industri global. Tantangan lain adalah adanya kemungkinan serbuan produk impor dari negara lain, akibat dari menurunnya permintaan produk di beberapa pasar utama ekspor dunia, yang kemudian dialihkan ke pasar Indonesia. Untuk itu, pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Menteri Perdagangan No. 56/M-DAG/PER/12/2008 yang telah diperbaharui oleh Peraturan Menteri Perdagangan No. 60/M-DAG/PER/12/2008 tentang ketentuan impor produk tertentu, yang mencakup produk pakaian jadi, makanan dan minuman, alas kaki, elektronika, dan mainan anak-anak. Ketentuan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2009 untuk produk pakaian jadi; dan untuk produk lainnya mulai berlaku pada tanggal 1 Februari 2009.

Penurunan Kinerja Ekspor Indonesia. Neraca Perdagangan Indonesia juga mengalami penurunan karena peningkatan ekspor lebih rendah dibandingkan dengan peningkatan impor, sebagai efek dari melemahnya permintaan global.

Gambar 2.3. Penurunan Neraca Perdagangan Indonesia

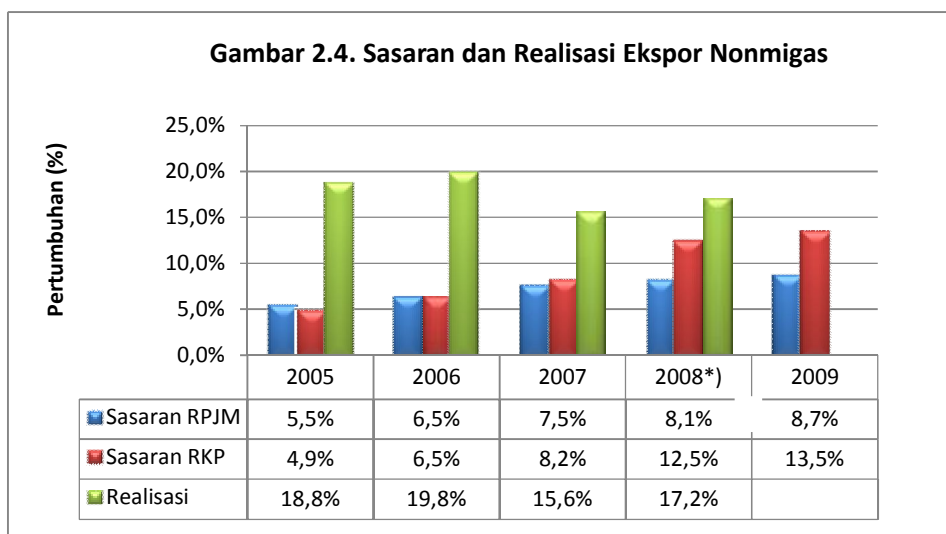


Sumber: BPS

Nilai ekspor Indonesia pun mengalami fluktuasi di sepanjang tahun 2008, mencatatkan nilai tertingginya sebesar USD12,89 milyar di bulan Juni dan kemudian mulai mengalami penurunan di paruh kedua tahun 2008. Ekspor nonmigas juga mencapai nilai tertingginya sepanjang tahun 2008 di bulan Juni, dengan nilai sebesar USD 9,91 milyar. Nilai ekspor nonmigas tersebut juga kemudian mulai mengalami penurunan di paruh kedua tahun 2008 kecuali di bulan September yang sempat menguat. Penurunan pertumbuhan untuk ekspor total dan nonmigas terbesar sepanjang tahun 2008 mulai dialami Indonesia di bulan Oktober, pertumbuhan ekspor total (m-o-m) menurun sebesar 11,6 persen dan ekspor nonmigas menurun sebesar 8,1 persen bahkan di bulan November ekspor nonmigas sempat menurun pertumbuhannya sampai dengan 9,2 persen.

Sementara itu dari pertumbuhan ekonomi pada tahun 2008 yang mencapai 6,1 persen ekspor barang dan jasa mendukung pertumbuhan sebesar 9,5 persen naik dari pertumbuhan tahun 2007 yang sebesar 8 persen. Pertumbuhan ekonomi tahun 2008 tersebut juga sebagian besar disumbangkan oleh komponen ekspor barang dan jasa, dari 6,1 persen pertumbuhan ekonomi tahun 2008, 4,6 persen bersumber dari komponen ekspor barang dan jasa. Bila dilihat dari kinerja perdagangan luar negeri selama tahun 2008 maka walaupun krisis keuangan global telah menurunkan tingkat pertumbuhan tahunan ekspor total maupun ekspor nonmigas Indonesia, namun sumbangan ekspor terhadap pertumbuhan maupun kinerja ekspor kita terutama ekspor nonmigas masih dapat diandalkan untuk menunjang perekonomian.

Secara kumulatif, ekspor Indonesia selama tahun 2007 dan 2008 menunjukkan perkembangan yang cukup baik. Pertumbuhannya dalam kurun waktu tersebut jauh diatas sasaran yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2005-2009 (RPJMN) bahkan dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahunan. Pertumbuhan ekspor nonmigas sepanjang tahun 2007 adalah sebesar 16,0 persen, dan pada tahun 2008 pertumbuhannya meningkat menjadi 17,2 persen.



Sumber: Bappenas dan BPS

Bila dibandingkan dengan Desember 2007, nilai ekspor Desember 2008 mengalami penurunan 20,56 persen, yang disumbang oleh turunnya ekspor migas sebesar 50,59 persen, sementara ekspor nonmigas juga turun sebesar 11,59 persen. Nilai ekspor Indonesia secara kumulatif selama Januari-Desember 2008 mencapai US\$136.761,7 juta atau meningkat 19,86 persen dibanding periode yang sama tahun 2007, sementara ekspor nonmigas mencapai US\$107.803,4 juta atau meningkat 17,16 persen.

Selama periode Januari-Desember 2008, ekspor dari 10 golongan barang (HS 2 digit) yaitu lemak & minyak hewan/nabati (HS 15), mesin/pesawat mekanik (HS 84), karet dan barang dari karet (HS 40), mesin/peralatan listrik (HS 85), bahan bakar mineral (HS 27), bijih, kerak, dan abu logam (HS 26), pakaian jadi bukan rajutan (HS 62), barang-barang rajutan (HS 61), perabot, penerangan rumah (HS 94), serta kertas/karton (HS 48) memberikan kontribusi 58,64 persen terhadap total ekspor nonmigas. Dari sisi pertumbuhan, ekspor 10 golongan barang tersebut meningkat 21,91 persen terhadap periode yang sama tahun 2007.

Sementara itu, peranan ekspor nonmigas diluar 10 golongan barang pada Januari-Desember 2008 sebesar 41,36 persen.

Selama periode Januari-Desember 2008, Jepang masih merupakan negara tujuan ekspor terbesar dengan nilai US\$13.811,2 juta (12,81 persen), diikuti Amerika Serikat dengan nilai US\$12.516,6 juta (11,61 persen), dan Singapura dengan nilai US\$10.098,2 juta (9,37 persen). Ekspor produk pertanian, produk industri serta produk pertambangan & lainnya masing-masing meningkat 34,98 persen, 15,15 persen, dan 24,62 persen.

Dilihat dari kontribusinya terhadap ekspor keseluruhan Januari-Desember 2008, kontribusi ekspor produk industri adalah sebesar 64,38 persen sedangkan kontribusi ekspor produk pertanian adalah sebesar 3,61 persen, dan kontribusi ekspor produk pertambangan & lainnya adalah sebesar 10,84 persen, sementara kontribusi ekspor migas adalah sebesar 21,17 persen.

G. Dampak terhadap Bidang Industri

Industri manufaktur. Perkembangan industri pengolahan bukan migas secara berturut-turut adalah 5,86 persen pada tahun 2005, 5,27 persen pada tahun 2006, 5,15 persen pada tahun 2007 serta 4,05 pada tahun 2008. Tiga subsektor industri yang memiliki pangsa kontribusi besar adalah industri makanan dan minuman, industri pupuk, kimia dan barang karet, serta industri alat angkut, mesin dan peralatan. Pada tahun 2008 ketiga subsektor ini tumbuh cukup baik yaitu berturut-turut sebesar 2,34 persen; 4,46 persen dan 9,79 persen. Data pertumbuhan triwulanan pada tahun 2008 menunjukkan bahwa pada triwulan ke-empat mengalami perlambatan yang cukup nyata, terutama subsektor yang rentan dengan pasokan atau permintaan pasar global, seperti industri tekstil, barang kulit dan alas kaki, industri kertas dan barang cetakan, industri logam dasar, besi dan baja, serta industri alat angkut, mesin dan peralatan. Pada tahun 2009 diperkirakan pertumbuhan industri masih melemah karena memang permintaan yang belum pulih akibat krisis global baik dari pasar domestik maupun dari pasar internasional. Sehingga pada tahun 2009 industri pengolahan non-migas diperkirakan tumbuh 3,94 persen.

Pada tahun 2009 diperkirakan pertumbuhan industri masih melemah karena memang permintaan yang belum pulih akibat krisis global baik dari pasar domestik maupun dari pasar internasional

**Tabel 2.2. Pertumbuhan Industri Pengolahan Non Migas
Tahun 2004 – 2008**
(Harga Konstan Tahun 2000)
(dalam persen)

Cabang Industri	2004	2005	2006	2007	2008
1). Makanan, Minuman, Tembakau	1,39	2,75	7,21	5,05	2,34
2). Tekstil, Brg. Kulit dan Alas Kaki	4,06	1,31	1,23	-3,68	-3,64
3). Brg. Kayu dan Hasil Hutan	-2,07	-0,92	-0,66	-1,74	3,45
4). Kertas dan Barang Cetak	7,61	2,39	2,09	5,79	-1,48
5). Pupuk, Kimia dan Barang Karet	9,01	8,77	4,48	5,69	4,46
6). Semen, Brg.Galian Non Logam	9,53	3,81	0,53	3,40	-1,49
7). Logam Dasar Besi dan Baja	-2,61	-3,70	4,73	1,69	-2,05
8). Alat Angkut, Mesin, Peralatan	17,67	12,38	7,55	9,73	9,79
9). Barang Lainnya	12,77	2,61	3,62	-2,82	-0,96
Industri Pengolahan Non Migas	7,51	5,86	5,27	5,15	4,05

Sumber: BPS, diolah Depperin

Pada tahun 2008 kebijakan dan pembinaan untuk mendorong pertumbuhan industri yang dilaksanakan antara lain revitalisasi teknologi produksi industri tekstil; rintisan pola pembinaan industri di daerah dengan skema *one village one product (OVOP)*; dan berbagai koordinasi lintas instansi untuk memecahkan berbagai persoalan nyata yang dihadapi oleh pengusaha industri. Menjelang akhir 2008, pembinaan industri difokuskan pada upaya menyiapkan industri nasional menghadapi krisis global, yaitu dengan memfasilitasi penyediaan insentif fiskal bagi industri-industri strategis. Langkah strategis lain dalam persiapan krisis global adalah menjaga pasar domestik dari produk-produk impor ilegal, yaitu dengan membatasi pelabuhan masuk barang-barang impor tersebut. Selanjutnya pada awal tahun 2009 persiapan menghadapi krisis global semakin ditingkatkan yaitu dengan mendorong peningkatan penggunaan produksi dalam negeri. Untuk itu, telah diterbitkan Instruksi presiden nomor 2 tahun 2009 tentang Penggunaan Produk Dalam Negeri Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

H. Dampak terhadap Investasi

Investasi. Pertumbuhan investasi berupa PMTB (Pembentukan Modal Tetap Domestik Bruto) selama tahun 2008 meningkat sebesar 11,7 persen, yang berarti tumbuh lebih tinggi dari tahun 2007 yang hanya

mencapai sebesar 9,2 persen. Meskipun investasi mengalami peningkatan cukup pesat selama tahun 2008, namun perlu diwaspadai karena pada triwulan IV-2008 mengalami perlambatan pertumbuhan, yaitu hanya meningkat 0,8 persen dibandingkan dengan triwulan III-2008. Pertumbuhan investasi tersebut sebagian didukung oleh tingginya peningkatan dari realisasi ijin usaha tetap (IUT) Penanaman Modal Asing (PMA) sektor non migas. Selama tahun 2008, realisasi IUT PMA mencapai nilai USD 14,87 miliar atau tumbuh 43,7 persen dalam denominasi mata uang dolar Amerika Serikat dibandingkan dengan tahun 2007. Meningkatnya kinerja PMA selama tahun 2008, memberikan imbas positif bagi pertumbuhan realisasi investasi sektor non migas secara keseluruhan yang mencapai Rp 164,27 triliun atau meningkat 26,9 persen dibandingkan dengan tahun sebelumnya, meskipun kinerja Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) menurun sebesar 41,6 persen selama tahun 2008.

Meskipun investasi mengalami peningkatan cukup pesat selama tahun 2008, namun perlu diwaspadai karena pada triwulan IV-2008 mengalami perlambatan pertumbuhan

Tabel 2.3. Realisasi Ijin Usaha Tetap PMDN dan PMA

	2006	2007	2008	Pertumbuhan (y-o-y)	
				2006 ke 2007	2007 ke 2008
Realisasi Investasi/IUT (triliun)	75,46	129,43	164,2	72%	26,9%
PMDN (Rp. Triliun)	20,65	34,88	20,36	69%	-41,6%
PMA (Rp triliun)	54,81	94,55	143,91	73%	52,2%
PMA (US\$ miliar)	5,98	10,35	14,87	73%	43,7%

Sumber: BKPM

Catatan: Kurs tengah tahun 2006 Rp 9.166 per USD

Kurs tengah tahun 2007 Rp 9.136 per USD

Kurs tengah tahun 2008 Rp 9.677 per USD

Dari sisi lokasi, pulau Jawa masih menduduki tingkat realisasi ijin usaha tetap PMDN tertinggi dengan nilai realisasi ijin usaha tetap sebesar Rp. 12,14 triliun, atau 59,6 persen dari total nilai realisasi IUT PMDN tahun 2008, diikuti dengan Pulau Sumatera dengan nilai realisasi ijin usaha tetap sebesar Rp. 4,8 triliun atau 23,8 persen, pulau Kalimantan dengan nilai IUT sebesar Rp. 1,55 triliun atau 8,9 persen serta Sulawesi dengan nilai IUT sebesar Rp. 2,8 triliun atau 5,6 persen dari total nilai realisasi IUT PMDN tahun 2008 yaitu sebesar Rp.20,3 triliun. Untuk realisasi IUT PMA, pulau Jawa tetap diminati oleh investor, dimana prosentase realisasi IUT PMA di pulau Jawa mencapai 91,2 persen dengan nilai USD 13,56 miliar, diikuti

pulau Sumatera 6,8 persen dengan nilai USD 1,38 miliar dari total nilai IUT PMA tahun 2008 sebesar USD 14,8 miliar.

I. Dampak terhadap Ketenagakerjaan (Pengangguran)

Dampak krisis terhadap ketenagakerjaan adalah pada pengurangan jumlah tenaga kerja dan peningkatan pengangguran

Terjadinya krisis keuangan global diperkirakan akan mengakibatkan terjadinya penurunan permintaan yang pada akhirnya akan berakibat pada pengurangan tenaga kerja. Jika permintaan luar negeri berkurang, industri akan melakukan penyesuaian, antara lain mengurangi produksi. Jika produksi dikurangi, kemungkinan besar sekali tenaga kerja pun akan dikurangi yang akan meningkatkan angka pengangguran. Artinya, dengan keadaan perekonomian Amerika Serikat yang tidak sehat ini, akan memberikan dampak langsung dan tidak langsung kepada Indonesia.

Dunia usaha harus membuat penyesuaian-penyesuaian usaha yang pada umumnya adalah penurunan jumlah output yang pada gilirannya berakibat pada penurunan jumlah permintaan input. Salah satunya ialah input tenaga kerja. Banyak terjadi pemutusan hubungan kerja selama krisis berlangsung. Beberapa kalangan menaytakan bahwa pemutusan hubungan kerja seperti ini akan berdampak langsung kepada peningkatan angka pengangguran. Kemungkinan yang terburuk adalah bahwa jumlah penganggur akan meningkat sebesar jumlah tenaga kerja yang mengalami pemutusan hubungan kerja. Kenyataan yang terjadi tidaklah demikian, karena seseorang yang mengalami pemutusan hubungan kerja tidak dengan serta merta menjadi seorang penganggur. Oleh karenanya jumlah kasus pemutusan hubungan kerja tidak dapat dijadikan patokan untuk memperkirakan jumlah penganggur dalam perekonomian.

Laporan yang dihimpun dari berbagai media menyebutkan bahwa tindakan PHK dan merumahkan pekerja sudah mulai berlangsung di beberapa tempat di Indonesia. Sejumlah perusahaan telah mengajukan untuk melakukan PHK terhadap pekerjanya.⁵ Pemerintah dalam usahanya untuk membantu para pengusaha untuk dapat mengurangi biaya produksi, beberapa waktu yang lalu melakukan pengendalian upah minimum melalui SKB 4 Menteri demi mencegah agar perusahaan terutama yang berorientasi ekspor tidak jatuh.

⁵ Berdasarkan kliping berita Direktorat Ketenagakerjaan, BAPPENAS, berbagai alasan-alasan yang dihimpun mengapa perusahaan melakukan PHK adalah (1) untuk mengurangi ongkos produksi (2) efisiensi dan efektivitas operasional pabrik akibat krisis global yang berdampak pada tingginya biaya produksi industri (3) menurunnya produksi dipabrik akibat berkurangnya pesanan dari luar negeri dan (4) iklim ekonomi yang tidak ramah.

Tabel 2.4. Pendataan Pekerja yang Terkena PHK

Posisi	Rencana PHK	Sudah PHK	Rencana Dirumahkan	Sudah Dirumahkan	Total
31 Desember 2009	25,577	23,752	19,391	10,306	79,026
5 Januari 2009	25,577	24,452	19,391	11,703	81,123
20 Januari 2009	24,817	27,346	19,191	11,963	83,317

Sumber: Depnakertrans

Banyak analisis yang mengasumsikan bahwa maraknya pemutusan hubungan kerja tersebut akan membawa konsekuensi langsung kepada peningkatan jumlah penganggur di Indonesia. Hal ini tidak sepenuhnya benar. Bagian berikut ini akan membahas hal tersebut. Seseorang secara resmi didefinisikan sebagai penganggur apabila orang tersebut termasuk dalam angkatan kerja, namun pada saat tertentu sedang tidak bekerja dan mencari pekerjaan.

Selanjutnya, angka pengangguran didefinisikan sebagai rasio antara jumlah penganggur terhadap total angkatan kerja. Dengan demikian menganggur berarti tidak memiliki pendapatan yang berasal dari kerja (*labor income*). Oleh karena itu menganggur hanyalah dimungkinkan apabila seseorang memiliki sejumlah pendapatan yang tidak berasal dari kerja (*non-labor income*) yang cukup. Dalam kerangka pikir seperti ini maka jelas bahwa maraknya pemutusan hubungan kerja tidak selalu berakibat langsung kepada peningkatan angka pengangguran sebab tidak semua kaum pekerja Indonesia memiliki *non-labor income* yang cukup untuk menutupi berbagai pengeluaran. Bekerja adalah keharusan untuk tetap memperoleh penghasilan. Dengan demikian tidak benar anggapan bahwa jumlah mereka yang mengalami pemutusan hubungan kerja adalah pendekatan (*proxy*) bagi jumlah penganggur di perekonomian.

Krisis jelas mempengaruhi pasar tenaga kerja Indonesia. Berbagai pergerakan di pasar tenaga kerja tersebut dapat diantisipasi dengan mengetahui karakteristik pasar tenaga kerja Indonesia itu sendiri. Bagian berikut ini akan menguraikan karakteristik pasar tenaga kerja Indonesia, dan setelah itu akan diuraikan efek dari krisis yang tercermin dalam berbagai pergeseran atau mobilitas yang terjadi di pasar tenaga kerja. Oleh karena itu tenaga kerja Indonesia harus tetap bekerja. Dalam situasi di mana jumlah lowongan kerja (*formal*) tidak mencukupi untuk menampung seluruh pencari kerja, dan menganggur tidak bisa menjadi pilihan, maka mereka harus memasuki lapangan kerja *informal*. Sektor *informal* ini memiliki beberapa karakteristik khusus. Misalnya, jenis

usahanya tidak memiliki status hukum dan tidak terdaftar resmi, lokasi usaha berpindah-pindah dan tidak menetap, skala usaha kecil, dan menggunakan buruh tidak tetap. Dengan segala kekurangan sektor informal ini, ia memiliki satu kelebihan yang tidak dimiliki sektor formal. Keuntungan itu ialah bahwa sektor ini tidak memiliki kapasitas maksimum penampungan tenaga kerja. Jumlah pekerja yang dapat ditampung di sektor ini tidak terbatas. Malah sektor ini dikatakan sebagai penampung tenaga kerja yang tidak bisa ditampung oleh sektor formal.

Kegiatan ekonomi informal memang kurang memperoleh perhatian di dalam literatur standar tentang pasar tenaga kerja. Namun di Negara berkembang seperti Indonesia, fenomena seperti ini yang terjadi. Oleh karena itu pekerja informal perlu menjadi perhatian utama dalam analisis dan perumusan kebijakan mengenai pasar tenaga kerja di Indonesia. Dalam situasi krisis ekonomi, lapangan pekerjaan informal akan menjadi semacam katup penyelamat. Para pekerja yang mengalami pemutusan hubungan kerja dari lapangan kerja formal tidak mampu menjadi pengangguran. Untuk tetap bekerja mereka akan memasuki kegiatan informal. Konsekuensinya, pemutusan hubungan kerja tidak akan serta merta meningkatkan angka pengangguran.

J. Dampak terhadap Kemiskinan

Dampak krisis terhadap kemiskinan terdapat pada penurunan daya beli masyarakat, peningkatan penduduk miskin, dan PHK

Kelesuan perekonomian global akan memberikan dampak pada perlambatan perekonomian di Indonesia. Perlambatan tersebut disebabkan antara lain oleh berkurangnya ekspor akibat kelesuan perekonomian di negara-negara tujuan ekspor, pemutusan hubungan kerja dan berkurangnya daya beli masyarakat akibat kenaikan inflasi, terutama di perkotaan. Sesuai sasaran tingkat kemiskinan yang sudah dituangkan di dalam RKP 2009, maka sasaran tingkat kemiskinan adalah 12 persen - 14 persen.

Secara umum, dampak krisis keuangan global terhadap kemiskinan antara lain:

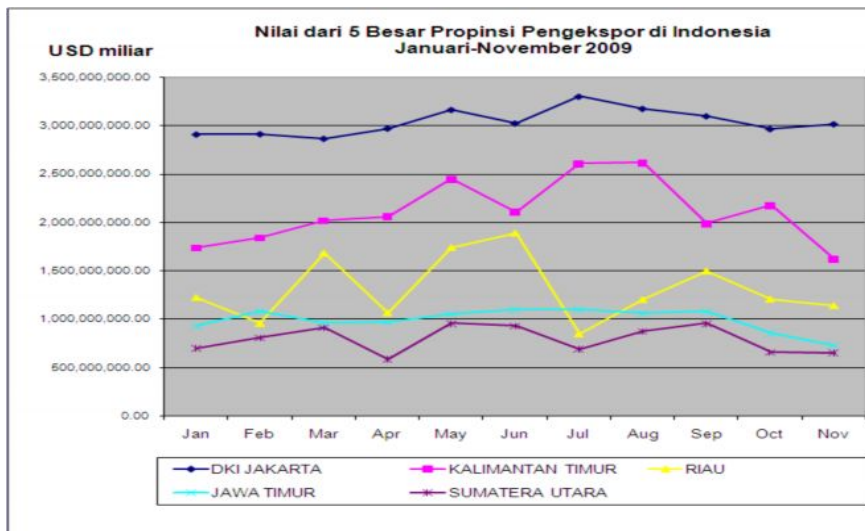
1. Penurunan daya beli masyarakat miskin dikarenakan kenaikan harga barang-barang.
2. Peningkatan penduduk miskin dan rentan yang diakibatkan PHK.

2.4 Dampak Krisis Keuangan Global Terhadap Perekonomian Daerah

Sektor Perdagangan. Sampai dengan bulan November 2008 DKI Jakarta, Kalimantan Timur, Riau, Jawa Timur, Sumatera Utara, Kepulauan

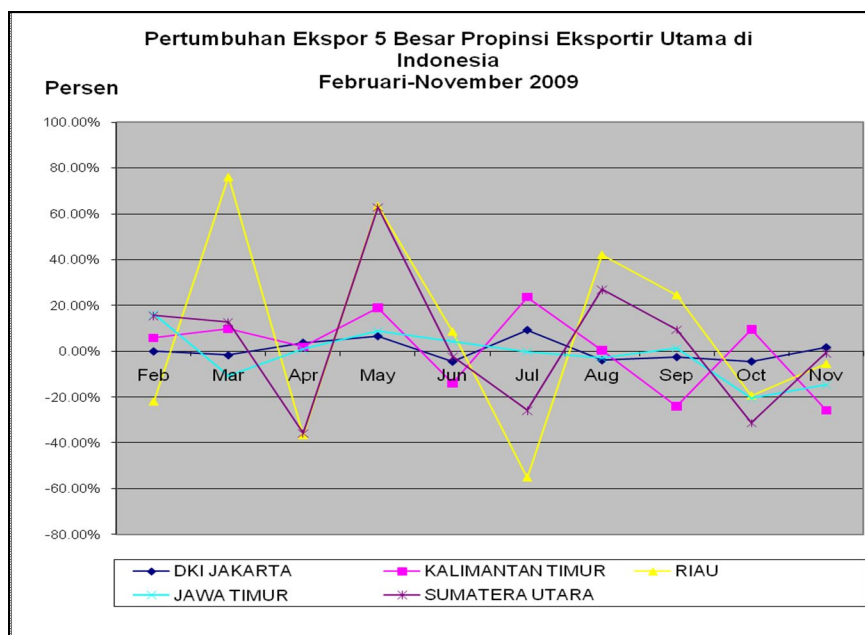
Riau, Sumatera Selatan, Jawa Tengah, Kalimantan Selatan, Lampung, merupakan 10 besar Propinsi dengan nilai perdagangan luar negeri yang terbesar. Secara rata-rata nilai ekspor perbulan sampai bulan November mencapai US\$ 11,6 miliar, namun mulai mengalami sedikit penurunan pada bulan Oktober dan November 2008.

Gambar 2.5. Nilai Ekspor 5 Besar Provinsi Pengekspor di Indonesia



Sumber: BPS (diolah Bappenas)

Gambar 2.6. Pertumbuhan Ekspor 5 Besar Provinsi Eksportir Utama di Indonesia



Sumber: BPS (diolah Bappenas)

Tabel 2.5. Nilai Ekspor Tiap Provinsi di Indonesia

Nilai Ekspor dari tiap Propinsi di Indonesia
Januari-November 2008

	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov
1 DKI JAKARTA	2.905.986.160	2.910.765.609	2.861.578.076	2.968.882.465	3.163.969.972	3.022.661.765	3.302.949.527	3.175.520.071	3.067.304.373	2.962.496.309	3.014.610.749
2 KALIMANTAN TIMUR	1.738.851.726	1.840.175.709	2.019.811.191	2.059.111.604	2.448.357.279	2.108.204.482	2.835.345.006	2.617.365.807	1.989.239.816	2.177.560.959	1.918.992.133
3 RIAU	1.229.916.069	967.238.261	1.685.626.454	1.066.699.258	1.744.113.041	1.893.369.976	847.616.844	1.204.435.966	1.500.059.467	1.208.566.379	1.142.072.459
4 JAWA TIMUR	926.066.071	1.076.066.619	960.167.227	967.528.393	1.052.257.325	1.046.374.264	1.063.030.959	1.060.142.442	1.073.740.274	852.343.673	726.830.633
5 SUMATERA UTARA	700.917.745	809.447.124	912.731.127	585.626.620	953.425.171	900.136.327	869.248.991	874.795.320	956.427.621	667.467.264	662.179.001
6 KEPULAUAN RIAU	537.408.399	480.507.637	670.401.157	643.545.762	655.059.482	693.167.475	684.482.964	734.064.261	726.675.449	600.159.479	590.812.607
7 SUMATERA SELATAN	329.856.670	259.666.670	313.166.590	259.748.246	317.630.888	300.172.734	312.076.355	299.207.382	359.405.212	240.159.889	236.817.759
8 JAWA TENGAH	281.436.004	288.162.324	304.974.802	293.540.373	303.908.772	285.962.379	318.781.432	276.840.428	286.019.423	272.870.484	231.783.137
9 KALIMANTAN SELATAN	254.117.534	216.645.783	222.423.373	436.878.402	324.831.084	337.590.150	367.943.757	287.654.554	421.854.455	207.348.641	190.358.810
10 LAMPUNG	210.156.041	204.808.511	228.268.373	220.402.169	242.768.383	310.309.215	240.273.138	255.549.510	237.238.649	211.872.926	187.423.660
11 KEPULAUAN BANGKA	497.887.688	122.776.345	117.035.182	176.522.334	299.685.270	62.079.479	317.671.893	72.307.362	25.339.379	154.933.388	144.804.842
12 PAPUA	290.887.990	211.847.692	67.136.744	181.255.362	223.192.545	212.670.998	306.747.278	344.649.439	262.527.444	126.363.328	131.231.995
13 NAGROE ACEH DARU	146.669.368	178.880.927	254.730.476	111.459.542	60.430.962	363.009.812	162.165.129	193.925.860	261.323.260	165.744.766	126.132.301
14 NUSA TENGGARA BARU	97.064.936	76.474.706	57.969.890	23.861.268	56.609.567	106.337.906	44.167.431	1.973.613	-	116.061.866	105.933.634
15 SULLAWESI SELATAN	220.547.391	247.751.968	160.216.817	214.859.239	74.176.955	79.479.503	47.138.848	108.994.212	184.391.195	143.088.346	98.528.930
16 SUMATERA BARAT	261.135.220	181.377.713	229.353.091	97.215.276	372.168.439	277.061.632	206.622.594	175.318.809	169.216.945	160.527.210	99.050.600
17 JAWAB	60.232.934	78.904.742	145.060.325	91.295.064	73.107.791	93.072.634	172.992.048	133.625.243	97.539.736	89.468.458	90.188.303
18 BANGSA BARAT	28.069.467	24.482.000	43.964.700	93.597.074	44.684.506	58.760.441	68.025.343	122.562.359	136.228.199	77.290.269	77.603.925
19 KALIMANTAN BARAT	75.195.553	74.054.072	61.236.139	60.742.326	87.469.075	87.459.572	73.204.437	93.970.715	96.911.155	59.805.363	46.740.061
20 SULLAWESI UTARA	61.720.497	40.303.048	21.063.066	52.446.409	63.257.127	174.073.100	37.620.493	73.054.651	44.289.538	20.116.178	42.673.647
21 BANTEN	52.729.384	66.617.618	55.921.461	49.955.327	51.124.370	68.562.747	54.421.173	52.561.610	122.149.426	57.432.869	40.611.646
22 JAWA BARAT	90.837.271	89.498.668	100.154.955	104.678.400	112.010.041	73.515.380	107.158.819	86.701.975	95.062.800	56.679.699	35.535.849
23 BALI	21.463.458	24.209.969	25.220.797	26.738.961	22.912.872	20.381.294	19.135.982	19.465.987	23.448.135	22.471.372	21.405.982
24 SULLAWESI TENGAH	29.452.561	49.099.471	10.048.266	12.470.439	16.066.544	46.640.724	23.033.653	49.961.000	15.534.529	24.684.810	17.451.581
25 KALIMANTAN TENGAH	47.272.318	20.035.474	62.159.915	54.852.922	11.587.326	18.896.122	12.354.115	21.160.998	5.946.511	15.143.011	16.068.706
26 MALIKULUTARA	36.048.969	-	66.987.121	69.269.477	51.810.610	24.278.239	26.131.171	19.493.223	11.964.590	30.265.870	7.092.804
27 BEKINGOLLO	4.957.917	5.747.643	7.913.000	3.635.698	5.443.462	6.906.390	8.521.083	99.698.527	-	16.262.971	3.448.316
28 SULLAWESI BARAT	7.041.796	2.805.000	3.399.070	-	5.317.140	1.698.365	-	-	-	-	1.482.000
29 SULLAWESI TENGGARA	86.349.024	27.578.071	267.150.717	10.064.622	72.168.203	62.496.185	5.104.400	988.516	35.967.854	799.960	1.242.520
30 NUSA TENGGARA TIMUR	311.208	429.975	81.522	192.800	150.192	123.200	609.682	2.764.666	1.501.265	1.625.091	1.007.815
31 MALIKU	1.340.704	-	28.162.268	-	662.166	43.564.272	-	3.249.126	-	27.024.934	1.063.451
32 DIYOGYAKARTA	185.467	-	193.513	562.394	344.279	189.984	436.456	262.039	95.262	365.005	476.044
33 GORONTALO	-	-	4.756.365	-	-	9.716.070	-	-	-	3.963.660	-
Total	11.191.684.172	10.546.639.397	12.008.883.719	10.921.678.332	12.910.351.508	12.818.440.340	12.627.861.831	12.466.886.809	12.277.778.043	10.789.974.267	9.665.708.182

Dilihat dari nilai ekspornya, dari 33 Propinsi di Indonesia hanya terdapat empat Propinsi yang menonjol dalam melakukan kegiatan ekspor dan impor, yaitu DKI Jakarta, Kalimantan Timur, Riau, serta Jawa Timur. Keempat Propinsi tersebut secara nasional adalah Propinsi yang mampu mencatatkan nilai ekspor diatas satu miliar dolar.

Sementara itu dilihat dari pertumbuhannya Propinsi DKI Jakarta, Jawa Timur adalah Propinsi yang mencatat nilai pertumbuhan ekspor relatif stabil, sementara itu Kalimantan Timur dan Riau mencatatkan pertumbuhan ekspor yang relatif berfluktuatif.

Sektor UMKM. Krisis ekonomi yang sedang terjadi mungkin tidak memberikan pengaruh langsung bagi usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) dan koperasi. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor seperti keterkaitan antara UMKM dan koperasi dengan perekonomian global yang masih sangat terbatas. Investasi asing yang masuk masih terfokus pada usaha skala besar. UMKM dan koperasi juga tidak memiliki hutang luar negeri. Sementara itu proporsi UMKM yang terlibat dalam pasar ekspor hanya mencapai 10 persen, dan hanya 0,19 persen diantaranya merupakan pelaku ekspor langsung. Sumbangan nilai ekspor non migas UMKM pada periode 2005-2007 masih pada kisaran 20 persen, dan sebagian besar produknya merupakan produk primer.

Orientasi sebagian besar UMKM dan koperasi pada pasar lokal menyebabkan UMKM dan koperasi relatif lebih bisa bertahan dalam kondisi krisis ekonomi saat ini. Data SUSI (BPS, 2005) menunjukkan bahwa 96,2 persen UMKM yang tidak berbadan hukum dan bergerak di sektor-sektor non pertanian masih memasarkan produknya hanya sebatas di dalam wilayah kabupaten/kotanya. Sisanya memasarkan produknya antar propinsi (2,4 persen) dan antar negara (0,13 persen). Kondisi ini terkait dengan jenis dan kualitas produk dan jasa yang disediakan oleh UMKM dan koperasi yang pada umumnya baru bisa menjangkau standar dan konsumen di pasar lokal dan regional.

Faktor lain yang menjadikan UMKM bisa bertahan dalam masa krisis yaitu UMKM relatif tidak terpengaruh keterbatasan pembiayaan/kredit yang disalurkan oleh perbankan. Pada awal pendirian usahanya, UMKM biasanya mengandalkan modal sendiri atau pinjaman dari keluarga/perseorangan. Pola pembiayaan lain yang diperoleh UMKM seiring dengan pertumbuhan usahanya mencakup pinjaman dari pemasok dan pembeli, serta pinjaman dari lembaga keuangan. Hal ini dibuktikan dari hasil Survey Usaha Terintegrasi BPS Tahun 2005 yang menunjukkan bahwa hanya sekitar 17,7 persen dari 18,2 juta UMKM yang disurvei yang memanfaatkan pinjaman dari sumber keluarga/perorangan/lainnya (62,8

Dari 33 Provinsi di Indonesia ada 4 provinsi yang aktif melakukan ekspor dan impor. Dilihat dari pertumbuhannya provinsi DKI Jakarta dan Jawa Timur mempunyai pertumbuhan ekspor yang relative stabil sementara Kalimantan Timur dan Riau relative berfluktuatif

Dampak krisis pada sektor UMKM tidak memberikan pengaruh langsung karena keterkaitan UMKM dengan perekonomian global masih terbatas (tidak memiliki hutang Luar negeri, orientasinya masih pada pasar lokal, mengandalkan modal sendiri bukan dari perbankan)

persen), bank (25,4 persen), koperasi (5 persen), LKM lainnya (5,4 persen), dan modal ventura (1,4 persen). Data dari BRI (2008) juga menunjukkan baru 35 persen dari sekitar 49 juta UMKM yang memiliki akses ke pembiayaan/kredit bank.

Selain itu, berdasarkan salah satu survey yang dilaksanakan oleh satu bank swasta, UKM di Indonesia cenderung memiliki pandangan yang optimis tentang prospek usahanya ke depan. Kelompok UKM yang disurvei memang cenderung akan mengambil keputusan bisnis yang lebih konservatif dan berhati-hati dalam berinvestasi dalam mengantisipasi dampak krisis ekonomi. Namun sebagian besar UKM tersebut masih akan mempertahankan tenaga kerja yang ada, bahkan 13 persen di antaranya berencana untuk menambah tenaga kerja dengan melihat prospek pengembangan usahanya di tahun 2009. Sebagian besar juga tetap akan melakukan belanja modal pada tahun 2009, dan optimis dapat mempertahankan volume perdagangannya pada tahun 2009.

Namun demikian, dampak dari krisis keuangan global saat ini tetap dapat dirasakan oleh sebagian UMKM, terutama yang terkait dengan pasar ekspor. Berdasarkan identifikasi terhadap sektor industri yang terkena dampak krisis keuangan global, beberapa sektor yang memiliki populasi UMKM yang cukup besar diantaranya: industri makanan dan minuman, produk tekstil, alas kaki, furnitur, rotan olahan, keramik dan kerajinan lainnya. Dampak yang dirasakan umumnya terkait dengan terhambatnya pemasaran ekspor. Krisis keuangan global menyebabkan adanya perebutan pasar yang diakibatkan oleh (i) penurunan permintaan di Amerika Serikat, Uni Eropa dan Jepang, serta (ii) peningkatan persaingan di pasar dalam negeri akibat adanya pengalihan pasar dari negara pengekspor ke negara-negara berkembang, termasuk Indonesia. Dampak lanjutan dari penurunan prospek pasar ekspor yaitu melemahnya pembiayaan UMKM karena sebagian besar UMKM memiliki modal yang terbatas.

Salah satu contoh riil mengenai dampak dari krisis keuangan global dialami oleh UMKM di sektor kerajinan yaitu turunnya permintaan, pembatalan, atau penurunan pesanan dari pembeli di luar negeri. UMKM pengrajin di Jawa Barat, misalnya, menyebutkan adanya penurunan permintaan ekspor sebesar 25-30 persen sejak terjadinya krisis keuangan global. Sebagian besar produk ekspor tersebut belum tentu dapat dialihkan dan diserap pasar dalam negeri. Bahkan penurunan permintaan ekspor terhadap produk-produk UMKM di sektor perdagangan besi tua, kulit dan furnitur bisa mencapai 50 persen atau lebih. Penurunan volume pemasaran produk dan meningkatnya bunga kredit juga sudah menyebabkan semakin menipisnya permodalan UMKM.

Krisis keuangan global juga mempengaruhi struktur dunia usaha nasional. Usaha skala besar dapat menyusut menjadi usaha skala menengah, dan hal ini ditunjukkan dengan trend menurunnya jumlah tenaga kerja pada usaha besar. Fenomena *business downsizing* juga dapat dialami oleh usaha menengah. Di sisi lain, kondisi ini menjadikan usaha mikro dan kecil memiliki peran yang strategis sebagai *economic safety valves* dengan menampung tenaga kerja dari usaha skala besar dan menengah. Memulai usaha dalam skala mikro dan kecil dianggap lebih fleksibel dan terjangkau oleh penganggur/tenaga kerja yang mengalami PHK karena dapat mengandalkan pemanfaatan bahan baku lokal, seperti untuk industri makanan, minuman dan pengolahan sederhana, sehingga mereka mampu bertahan ketika krisis ekonomi melanda (ILO, 2004). Namun untuk bisa cepat pulih dalam menghadapi krisis ekonomi, UMKM juga membutuhkan adanya penyediaan peluang usaha yang berkelanjutan dengan hambatan akses terhadap sumberdaya yang seminimal mungkin.

Sektor ketenagakerjaan. Secara nasional, pada tahun 2009, tingkat pengangguran terbuka akan diturunkan menjadi 8,3 persen apabila ekonomi tumbuh dengan 5,0 persen. Apabila ekonomi tumbuh 4,5 persen, angka pengangguran terbuka menjadi 8,6 persen. Perkiraan ini mempertimbangkan adanya PHK yang tidak terserap kembali dalam pasar kerja. Masalah pengangguran merupakan tantangan besar yang harus ditangani bersama. Kesadaran pekerja, pengusaha dan bahkan dukungan politik sangat menentukan di dalam menurunkan tingkat pengangguran terbuka keseluruhan ini akan memberikan gambaran ketenagakerjaan yang lebih baik. Tercapainya sasaran penurunan angka pengangguran, sangat berpengaruh terhadap tingkat pengangguran di setiap daerah. Peranan daerah sangat penting dalam mendorong penurunan angka pengangguran. Dengan semakin besarnya fungsi pelayanan kepada masyarakat yang diberikan kepada daerah, peran daerah untuk mendorong kegiatan ekonomi semakin besar. Keselarasan antara APBN dan APBD sangat penting yang kemudian mendorong kegiatan ekonomi dan menciptakan kesempatan kerja di daerah. Pemecahan masalah pengangguran memerlukan dukungan institusi yang kuat dalam menjabarkan, termasuk didalamnya adalah mekanisme yang mampu memastikan bahwa pelaksanaan dari berbagai kebijakan penciptaan lapangan kerja benar-benar terjabarkan dengan baik, termasuk oleh daerah. Lebih lanjut, daerah-daerah yang merupakan kantong-kantong pengangguran perlu didorong menciptakan lapangan kerja, baik melalui investasi maupun melalui program-program APBN dan APBD.

Deskripsi pengangguran secara nasional merupakan agregasi dari gambaran pengangguran di daerah. Beberapa kalangan menyatakan bahwa keputusan hubungan kerja akan berdampak langsung kepada peningkatan angka pengangguran. Kemungkinan yang terburuk adalah

bahwa jumlah penganggur akan meningkat sebesar jumlah tenaga kerja yang mengalami pemutusan hubungan kerja. Besarnya PHK dapat dicermati dari pemantauan perusahaan/industri yang melakukan PHK yang wajib dilaporkan kepada Dinas Tenaga Kerja setempat. Jumlah PHK selanjutnya dipantau untuk mengetahui apakah mereka masuk dalam kelompok penganggur atau masuk kembali dalam pasar kerja, atau keluar dari angkatan kerja. Kemungkinan ini dapat terjadi karena seseorang yang mengalami pemutusan hubungan kerja tidak dengan serta merta menjadi seorang penganggur. Oleh karenanya jumlah kasus pemutusan hubungan kerja tidak dapat dijadikan patokan untuk memperkirakan jumlah penganggur dalam perekonomian. Ada dua arus keluar utama dari kelompok bekerja yang disebabkan oleh pemutusan hubungan kerja. *Pertama* ialah arus masuk ke kelompok pekerja informal. Seseorang dari kelompok formal bisa masuk ke kelompok pekerja informal dengan dua cara. Cara pertama adalah langsung, artinya setelah mengalami pemutusan hubungan kerja kemudian si pekerja langsung menjadi tenaga kerja informal. Cara ini cenderung ditempuh oleh mereka yang hidupnya sepenuhnya digantungkan kepada *labor income*. Karena itu mereka harus bekerja, dan sektor informal menjadi katup penyelamat yang paling efektif di saat pemutusan hubungan kerja. Cara kedua adalah tidak langsung. Mereka yang menggunakan cara kedua ini relatif memiliki non-labor income sehingga dapat bertahan menganggur untuk beberapa saat. Saat menganggur, mereka yang mencari pekerjaan formal, namun probabilita sangat kecil karena investasi yang diharapkan belum cukup menciptakan lapangan kerja, sehingga probabilitasnya lebih tinggi untuk mendapatkan pekerjaann informal. Oleh karena itu pada akhirnya mereka akan menjadi pekerja sektor informal. *Kedua* adalah mereka yang mengalami pemutusan hubungan kerja tersebut memutuskan untuk keluar dari pasar tenaga kerja, dan keluar dari kelompok angkatan kerja.